



DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KALURAHAN
KABUPATEN BANTUL

LAPORAN KINERJA (LKj)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merupakan unsur pendukung tugas Bupati, yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan.

TAHUN 2022

dpmkbantul

dpmkbantul

Dinas PMK Bantul

dpmk.bantulkab.go.id

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul D.I. Yogyakarta



LAPORAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2022



Rajut dan tenun kebersamaan elemen tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat dalam rangka membangun desa yang inovatif, adaptif, tetap dengan kearifan lokal, serta bersinergi dalam menciptakan inovasi dan terobosan baru
(Abdul Halim Muslih, 2022)



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja tahun 2022 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap Perjanjian Kinerja pada tahun 2022, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Lebih jauh Laporan Kinerja ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance dan juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik. Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa Kinerja yang perlu ditingkatkan. .

Akhir kata, apresiasi setinggi-tingginya disampaikan kepada seluruh *stakeholder* dan pegawai atas kerjasama dan dukungan yang telah diberikan dalam rangka peningkatan kinerja. *“Semoga ke depan kita lebih baik dan bermanfaat bagi orang banyak”*

Kepala,

Dra. Sri Nuryanti, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196707101993032008



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 172 Tahun 2021 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul .

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul hanya memiliki satu (1) IKU, yaitu Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap IKU, disimpulkan bahwa indikator tersebut berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 196,97%.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.



Dari 75 desa yang ada di Kabupaten Bantul, 65 desa berstatus mandiri dan 10 desa berstatus desa maju

DAFTAR

ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	8
1.2 Pembentukan OPD	8
1.3 Susunan Organisasi	9
1.4 Keragaman SDM	10
1.5 Isu Strategis	12
1.6 Cascading Kinerja	13
1.7 Peta Proses Bisnis	13
1.8 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	16
1.9 Sistematika Laporan	16

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis	17
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	21
2.3 Program untuk Pencapaian Sasaran	23

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja	26
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	28
3.3 Akuntabilitas Anggaran	49
3.4 Efisiensi Sumber Daya	51

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan	52
4.2 <i>The Next Steps</i>	53

LAMPIRAN	54
----------	----

DAFTAR

TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	10
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	11
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	11
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	11
Tabel 1.5	Identifikasi Isu-Isu Strategis	12
Tabel 1.6	Cascading Sasaran Daerah, Sasaran Perangkat Daerah, Indikator Kinerja, Dan Program Prioritas	14
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	19
Tabel 2.2	Strategi dan Kebijakan	20
Tabel 2.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama ²¹	21
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	22
Tabel 2.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022	23
Tabel 3.1	Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi LKj DPMK Kabupaten Bantul Tahun 2022	25
Tabel 3.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja	26
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun Anggaran 2022	27
Tabel 3.4	Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2022	29
Tabel 3.5	Perkembangan Status Desa di Kabupaten Bantul menurut IDM 2016-2022	32
Tabel 3.6	Peringkat Nilai Rata-Rata Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022 Nasional, Provinsi DIY, Kabupaten Lain di DIY, dan Kabupaten Bantul	33
Tabel 3.7	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022	49
Tabel 3.8	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022	49
Tabel 3.9	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	51

DAFTAR

GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi DPMK Kabupaten Bantul	10
Gambar 1.2	.Proses Bisnis DPMK	15
Gambar 3.1	Status Desa Hasil Pemutakhiran IDM Tahun 2022	32
Gambar 3.2	Dokumentasi Pelaksanaan Program Penataan Desa	34
Gambar 3.3	Dokumentasi Program Peningkatan Kerjasama Desa	35
Gambar 3.4	Dokumentasi Program Administrasi Pemerintahan Desa	39
Gambar 3.5	Dokumentasi Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	45



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.2 Pembentukan OPD

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Merupakan gabungan dari bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dengan Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

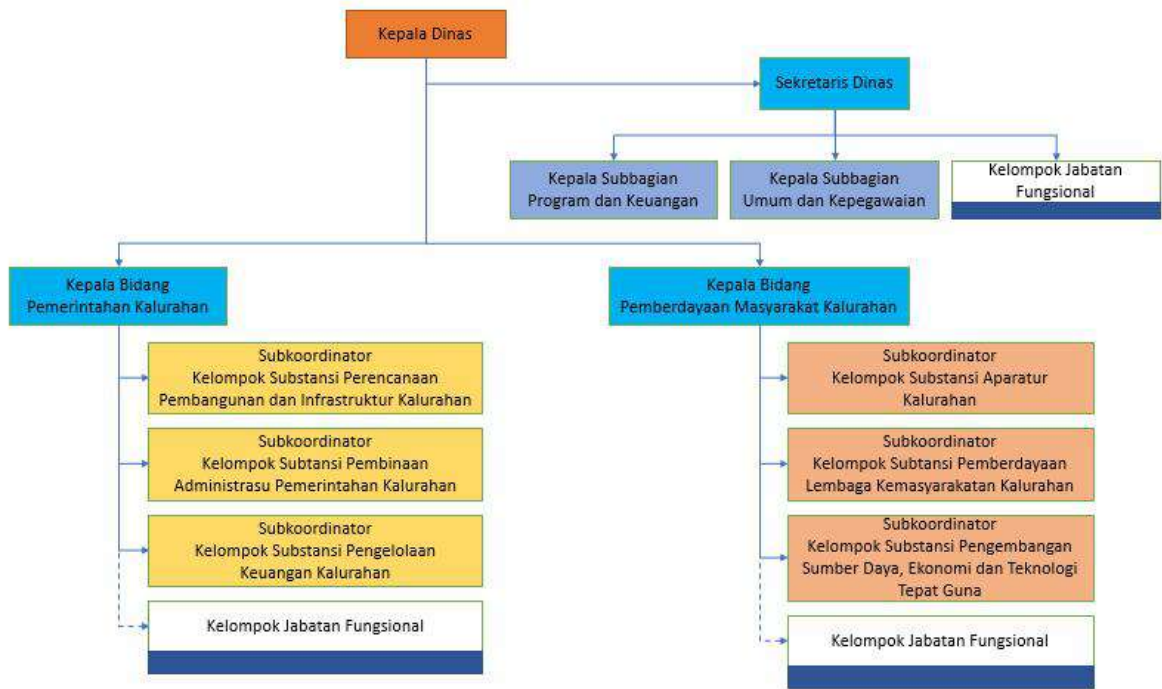
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Dinas;
- b. pengkoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- c. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- d. pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
- e. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- f. pelayanan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- g. pemberian rekomendasi perizinan/non perizinan bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- h. pengkoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- i. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- k. pengkoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- l. pengkoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- m. pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

1.3 Susunan Organisasi

Struktur organisasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul nomor 172 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Kabupaten Bantul. Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi DPMK Kabupaten Bantul

Sumber : Peraturan Bupati Bantul nomor 172 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Kabupaten Bantul

1.4 Keragaman SDM

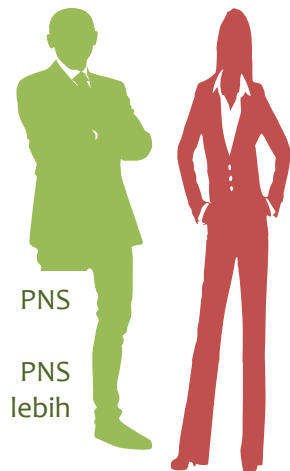
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul didukung oleh personil sebanyak 30 orang dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini:

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	10 orang
2	Wanita	20 orang
Jumlah		30 orang

Sumber : Aplikasi SAPA ASN, 2022, diolah



dari total 30 PNS tersebut, proporsi PNS wanita lebih mendominasi sebesar 70% dan PNS laki-laki sebesar 30%.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Klasifikasi pegawai PNS menurut tingkat pendidikan, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan didominasi oleh lulusan Strata-1 (S-1) sebesar 33%, kemudian lulusan SMA sebesar 27% dan lulusan S2 sebesar 23%. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	
1	Pasca Sarjana (S-2)	7 orang
2	Sarjana (S-1)	10 orang
3	Diploma (D-3)	5 orang
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	8 orang
Jumlah		30 orang

Sumber : Aplikasi SAPA ASN, 2022, diolah



Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	4 orang
2	III	24 orang
3	II	2 orang
Jumlah		30 orang

Sumber : Aplikasi SAPA ASN, 2022, diolah

Untuk melihat jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel 1.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	6 orang
2	Sub Koordinator	6 orang
3	Fungsional Umum	18 orang
Jumlah		30 orang

Sumber : Aplikasi SAPA ASN, 2022, diolah

Selain Pegawai Negeri Sipil, dalam menjalankan tugas dan fungsi, juga didukung oleh tenaga PHL/kontrak sejumlah 19 orang dengan klasifikasi jabatan sebagai tenaga administrasi (14 orang), tenaga caraka (1 orang), driver (1 orang), tenaga keamanan (1 orang), dan tenaga kebersihan (2 orang). Keberadaan tenaga PHL/kontrak merupakan salah satu input yang sangat berperan dalam menjalankan roda organisasi khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan.

1.5 Isu Strategis



Analisis isu strategis dilakukan melalui proses pengidentifikasian dan inventarisasi jenis pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis dan beberapa strategi ke depan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah:

Tabel 1.5
Identifikasi Isu-Isu Strategis

ISU STRATEGIS	STRATEGI
1. Belum memadainya kualitas sumber daya manusia pamong kalurahan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan keuangan serta penguasaan teknologi informasi;	1. Meningkatkan kerjasama desa
2. Belum optimalnya pengelolaan data profil kalurahan;	2. Meningkatkan Penataan Desa
3. Belum optimalnya Peranan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK)	3. Meningkatkan administrasi pemerintahan desa
4. Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi kalurahan;	4. Memberdayakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat
-	5. Menyelenggarakan keistimewaan Yogyakarta urusan pertanahan
-	6. Menyelenggarakan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan
-	7. Menyelenggarakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Sumber : Renstra DPMK Kab. Bantul 2021-2026

1.6 Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja dapat dilihat pada tabel 1.6.

1.7 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar 1.2.

Tabel 1.6
CASCADING SASARAN DAERAH, SASARAN PERANGKAT DAERAH, INDIKATOR KINERJA, DAN PROGRAM PRIORITAS

VISI:

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika

RPJMD KABUPATEN BANTUL			RENSTRA DPMK				
MISI	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM
Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif	Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Mewujudkan Pemerataan Pendapatan	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penataan Desa 2. Program Peningkatan Kerjasama Desa 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa 4. Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (DAIS) 6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan (DAIS)

Sumber : Renstra DPMK Kab. Bantul 2021-2026, diolah

PEMETAAN PROSES BISNIS



1.8 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/070.C/Ev.SAKIP/ 2022 tanggal 28 Maret 2022, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
	Penyajian informasi kinerja menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional dan menyajikan capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas	akan menyajikan capaian kinerja dengan membandingkan dengan kabupaten lain dalam DIY, capaian provinsi dan nasional

1.9 Sistematika Laporan

Laporan Kinerja DPMK Kabupaten Bantul terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : **Pendahuluan**
Memuat secara ringkas latar belakang, pembentuka OPD, susunan organisasi, keragaman SDM, isu strategis, cascading kinerja, peta proses bisnis, dan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 serta sistematika penyajian;
- Bab II : **Perencanaan Kinerja**
Memuat Rencana Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022, dan Program untuk pencapaian sasaran;
- Bab III : **Akuntabilitas Kinerja**
Berisi penjelasan singkat tentang capaian indikator kinerja utama tahun 2022, evaluasi dan analisis capaian kinerja per sasaran melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan, serta akuntabilitas anggaran;
- Bab IV : **Penutup**
Menguraikan ringkasan dan kesimpulan pencapaian kinerja dan pemanfaatannya sebagai umpan balik dalam perencanaan pembangunan daerah.



BAB II. PERENCANAAN KINERJA



2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2022 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul yaitu :

Visi



“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Kedua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Misi 3

Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif	Mewujudkan Pemerataan Pendapatan	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri

Sumber : Renstra DPMK Kab. Bantul 2021-2026

2.1.2 Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 3 : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif			
Mewujudkan Pemerataan Pendapatan	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	Meningkatkan kerjasama desa	Peningkatan fasilitasi kerjasama antar desa
		Meningkatkan Penataan Desa	Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Desa
		Meningkatkan administrasi pemerintahan desa	Peningkatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
		Memberdayakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Peningkatan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota
		Menyelenggarakan keistimewaan Yogyakarta urusan pertanahan	Penyelenggaraan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
		Menyelenggarakan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan	Penyelenggaraan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan
		Menyelenggarakan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggara-an Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah 2. Penyelenggaraan pengadmi-nistrasian keuangan perangkat Daerah 3. Penyelenggara an pengadminis-trasian Umum Perangkat Daerah 4. Penyelenggara an pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Sumber : Renstra DPMK Kab. Bantul 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Program Penataan Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (DAIS)	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan (DAIS)

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri

Sumber : Renstra DPMK Kab. Bantul 2021-2026

2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2022, IKU dan APBD. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	Kalurahan	33	I	33
					I	33
					III	33
					IV	33
					IV	*
No	Program				Anggaran (Rp)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Rp	6.282.890.346
2	Program Penataan Desa				Rp	15.115.000
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa				Rp	22.451.000
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa				Rp	4.875.570.046
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat				Rp	2.537.571.472
6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (DAIS)				Rp	1.176.354.500
7	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan (DAIS)				Rp	526.250.000
Jumlah						15.436.202.364

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome
Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja DPMK Kab. Bantul TA 2022

2.3 Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	<ol style="list-style-type: none">1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota2. Program Penataan Desa3. Program Peningkatan Kerjasama Desa4. Program Administrasi Pemerintahan Desa5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (DAIS)7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan (DAIS)

Sumber : Renstra tahun 2021-2026



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.



Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan.

Tabel 3.1

Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Monitoring dan Evaluasi LKj DPMK Kabupaten Bantul Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Jenis Data	Formulasi/Rumus Perhitungan	Teknik Pengumpulan Data	Teknik Monitoring dan Evaluasi
Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya jumlah Desa Mandiri					
1.	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	Kuantitatif	Jumlah kumulatif desa yang berstatus mandiri pada tahun n	Pengumpulan data dari Berita Acara Penetapan Status Desa, ebook IDM E-Book Peringkat IDM Tahun 2022 (https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/3/publikasi)	Crosscheck data ke TA pendamping desa; entri data ke e-sakip, melakukan evaluasi rencana aksi kinerja sasaran

Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

3.1 Capaian Kinerja



Kinerja DPMK Kabupaten Bantul diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian indikator Sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya, kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :





$$\text{Capaian indikator kinerja} = \text{Realisasi/Rencana} \times 100\%$$

Pencapaian IKU DPMK Kabupaten Bantul Tahun 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun secara lengkap ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
1	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	%	33	65	196,97

Keterangan Warna

Warna	Prosentase	Keterangan
	0 s/d 50	Sangat Rendah
	50.1 s/d 65	Rendah
	65.1 s/d 75	Sedang
	75.1 s/d 90	Tinggi
	90.1 lebih	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja DPMK Kabupaten Bantul Tahun 2022 disimpulkan bahwa indikator sasaran Meningkatkan jumlah Desa Mandiri ber kriteria **Sangat Tinggi**.



3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja



Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja pada setiap indikator sasaran yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis. Evaluasi merupakan perbandingan data hasil pengukuran yang diperoleh (realisasi) dengan beberapa data pembandingan.

Evaluasi pada Laporan ini akan dilakukan perbandingan data sebagai berikut :

1. Nilai realisasi dengan target tahun 2022;
2. Nilai realisasi tahun 2022 dengan target akhir Renstra;
3. Nilai realisasi tahun 2022 dengan realisasi pada tahun 2021;
4. Nilai realisasi tahun 2022 dengan capaian kabupaten lai, provinsi DIY, dan nasional

Untuk mengukur capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul adalah dari sasaran meningkatnya jumlah desa mandiri yang IKU nya adalah jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri. Untuk tahun 2022 ini capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil diatas ekspektasi. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 33 kalurahan, realisasi sebesar 65 kalurahan, tercapai **196,97%** atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 27 kalurahan, maka capaian tahun 2022 meningkat sebesar 140,74%. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 73 kalurahan. Capaian tahun 2022 ini telah menyumbangkan **89,04%** dari target akhir Renstra tahun 2026.

Tabel 3.4
Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Prosentase	Keterangan
1	Meningkatnya jumlah desa mandiri	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	kalurahan	33	Triwulan 1	33			a. Dari 75 kalurahan di Kabupaten Bantul, terdapat 65 kalurahan bestatus Desa Mandiri dan 10 kalurahan berstatus Desa Maju. b. Saat ini Kabupaten Bantul tidak memiliki kalurahan yang berstatus Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, dan Desa Berkembang. c. Rumus IKU : Jumlah kumulatif desa yang berstatus mandiri pada tahun -n
					Triwulan 2	33			
					Triwulan 3	33			
					Triwulan 4	*	65	196,97	

Tabel 3.5 Perbandingan Target Kinerja Tahun(berjalan) dengan Target Akhir RPJMD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2022

No	Sasaran / Indikator Sasaran	Capaian/Kondisi 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian 2021 terhadap 2026 (AKHIR RPJMD)(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
	Meningkatnya jumlah desa mandiri						
	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	27	33	65	196,97	73	89,04

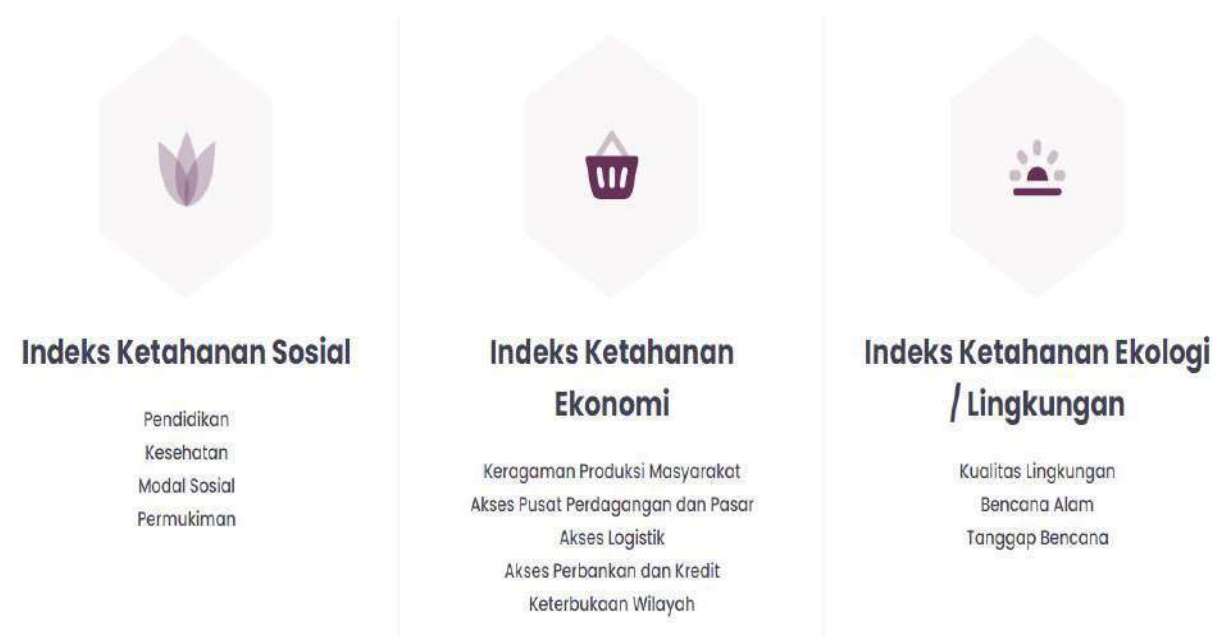
Faktor Penghambat : Belum optimalnya pengelolaan keuangan kalurahan; Keterbatasan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan kalurahan

Faktor Pendorong : Banyaknya kalurahan yang dapat memenuhi skor IDM IKS : Indeks Ketahanan Sosial IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan; Kemitraan dan sinergi dengan mitra kerja (Bamuskal, Perangkat Kalurahan, TNI, dll); Adanya fasilitasi bantuan keuangan dari APBD dan APBN dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pedukuhan, TMMD, Dana Insentif Desa, BLT DD, dll

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2023 : meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas aparatur terkait dengan pemberdayaan masyarakat (dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan/ diklat, seminar, workshop, in house training), dan fasilitasi kalurahan.

Sumber : esakip.bantulkab.go.id

Dalam melakukan pengukuran sasaran strategis diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul menggunakan data **Indeks Desa Membangun (IDM)**. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.



Instrumen IDM digunakan sebagai alat pengukuran status perkembangan desa, dengan memperhatikan 3 (tiga) dimensi utama yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL). Masing-masing dimensi tersebut dijabarkan lagi dalam indikator, variabel dan data-data yang diperlukan untuk pengukuran. Selengkapnya Indeks Desa Membangun sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan tersebut, terdapat 5 (lima) klasifikasi status desa, yakni:



Desa Mandiri

adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.



Desa Tertinggal

adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya



Desa Maju

adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan



Desa Pratama/Sangat Tertinggal

adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya



Desa Berkembang

adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan

Indeks Desa Membangun (IDM) : Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa

STATUS DESA	RENTANG NILAI
Mandiri	> 0,8155
Maju	> 0,7072 s.d ≤ 0,8155
Berkembang	> 0,5989 s.d ≤ 0,7072
Tertinggal	> 0,4907 s.d ≤ 0,5989
Sangat Tertinggal	≤ 0,4907

Tabel 3.5
Perkembangan Status Desa di Kabupaten Bantul menurut IDM 2016-2022

Status Desa IDM	Jumlah Desa menurut Status IDM						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mandiri	15	N/A	15	18	27	46	65
Maju	49	N/A	55	57	48	29	10
Berkembang	11	N/A	5	-	-	-	-
Tertinggal	-	N/A	-	-	-	-	-
Sangat Tertinggal	-	N/A	-	-	-	-	-
Jumlah	75	75	75	75	75	75	75

*) catatan : Tahun 2017 Kementerian Desa PDTT tidak mempublikasikan nilai IDM Tahun 2017
Sumber : kemendes.go.id, diolah

Capaian kinerja utama Sasaran strategis dengan mengukur status perkembangan desa tahun 2022, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5 bahwa keberhasilan pembangunan desa yang diukur dengan status perkembangan desa (perubahan status desa dari maju menjadi mandiri) sangat baik dan menunjukkan trend yang positif. Desa sangat tertinggal, tertinggal, dan berkembang tidak ada lagi di Kabupaten Bantul, dan sebaliknya desa maju dan mandiri semakin meningkat.



Gambar 3.1 Status Desa Hasil Pemutakhiran IDM Tahun 2022

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa jumlah desa Mandiri mendominasi sebesar 87% (65 desa) dan Desa Maju sebesar 13% (10 desa) dengan nilai rata-rata IDM dari keseluruhan nilai IDM 75 desa sebesar 0,8566 (kategori Mandiri).

Tabel 3.6
Peringkat Nilai Rata-Rata Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022
Nasional, Provinsi DIY, Kabupaten Lain di DIY, dan Kabupaten Bantul

NO.	PROV/KAB.	NILAI RATA-RATA IDM	STATUS IDM
1	NASIONAL	0,6724	BERKEMBANG
2	PROVINSI DIY	0.8128	MAJU
3	KAB.BANTUL	0.8566	MANDIRI
4	KAB. SLEMAN	0.8290	MANDIRI
5	KAB.KULON PROGO	0.7856	MAJU
5	KAB. GUNUNGKIDUL	0.7968	MAJU

*) Catatan

*) Catatan: Status IDM Nasional, Provinsi, Kabupaten diperoleh dari nilai rata-rata IDM Desa di wilayah tersebut

Sumber : Sumber : kemendes.go.id, diolah

Nilai IDM Kabupaten Bantul merupakan nilai tertinggi dibanding dengan rata-rata nilai Nasional, Provinsi DIY dan Kabupaten lainnya dalam DIY, yakni dengan nilai IDM 0,8566 dengan status IDM Mandiri.

Point penting dari capaian desa-desa berdasarkan parameter IDM tersebut adalah bahwa desa di tengah-tengah pandemi saat ini tetap dapat berkinerja tinggi guna merealisasikan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari Dana Desa. Selain itu, peran tenaga ahli dan tenaga pendamping desa juga turut andil besar dalam mengawal Dana Desa agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat adanya banyak perubahan kebijakan dalam tata kelola Dana Desa tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Desa agar bisa berjalan dengan baik, benar dan akuntabel.

Berikut penjelasan hasil analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022:

PROGRAM PENATAAN DESA

Indikator program ini adalah cakupan Pelaksanaan Penataan Desa dengan target 75% terealisasi 100% atau 133,33%. Pagu anggaran sebesar Rp 15.115.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.115.000,00 atau 100%.

Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Kalurahan yang menyelenggarakan Penataan Desa dengan target 75 kalurahan terealisasi 75 kalurahan. Pagu anggaran kegiatan ini Rp.15.115.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.115.000,00 atau 100%. Kegiatan ini didukung oleh satu (1) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa. Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.15.115.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.115.000,00 atau 100%. Indikator sub kegiatan ini tercapai, yakni 75 kalurahan dari target 75 kalurahan atau 100% Kalurahan yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Kewenangan Desa (Produk Hukum, Aset Kal, Batas Kal). Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- a. sosialisasi Sipades (sistem pengelolaan aset desa) 75 kalurahan
- b. sosialisasi terkait Penyelenggaraan Kewenangan Desa (Produk Hukum, Aset Kal, Batas Kal) 75 kalurahan

Gambar 3. 2 Dokumentasi Pelaksanaan Program Penataan Desa



Sosialisasi SIPADES kepada Kaur Tata Laksana bagi 75 kalurahan se-Kabupaten Bantul. Dalam sosialisasi tersebut dibagikan *manual book* aplikasi SIPADES dan juga user name bagi user SIPADES 75 kalurahan. Agar sesudahnya, kalurahan dapat segera mengentry pengadaan aset di aplikasi SIPADES

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

Indikator program ini adalah Cakupan Pendampingan Kerjasama Desa dengan target 100% terealisasi 100% atau 100%. Pagu anggaran sebesar Rp 22.451.000,- dan terealisasi sebesar Rp22.201.000,- atau 98,89%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tercapainya Persentase Desa Melakukan Komitmen Kerjasama Antar Desa dengan target 75 kalurahan terealisasi 75 kalurahan. Pagu anggaran kegiatan ini Rp 22.451.000,- dan terealisasi sebesar Rp22.201.000,- atau 98,89%. Kegiatan ini didukung oleh satu (1) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota. Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp 22.451.000,- dan terealisasi sebesar Rp22.201.000,- atau 98,89%. Indikator sub kegiatan ini tercapai 113,33%, yakni jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota sebanyak 17 dokumen dari target 15 dokumen. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- a. Bimtek Peningkatan Kapasitas BKPD, BPUPK 32 orang
- b. Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK 70 orang
- c. Pelaksanaan Transformasi UPK menjadi Bumkalma

Gambar 3. 3 Dokumentasi Program Peningkatan Kerjasama Desa



Pendampingan Penetapan ART dan Proker Bumkal Bersama



Pendampingan Mak Kapanewon Banguntapan

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Indikator program ini adalah Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan yang Baik dengan target 100% terealisasi 100% atau 100%. Pagu anggaran sebesar Rp4.875.570.046,- dan terealisasi sebesar Rp4.834.081.350,- atau 99,15%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tercapainya Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan target 80% terealisasi 100%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp4.875.570.046,- dan terealisasi sebesar Rp4.834.081.350,- atau 99,15%. Kegiatan ini didukung oleh 12 sub kegiatan yaitu:

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp 110.370.500,- dan terealisasi sebesar Rp110.370.500,- atau 100%. Indikator sub kegiatan ini tercapai 100%, yakni jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa sebanyak 75 dokumen dari target 75 dokumen. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- a. Bimbingan Teknis SIPADES 75 kalurahan
- b. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Musrenbang 150 orang

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp 30.127.520,- dan terealisasi sebesar Rp30.127.000,- atau 100%. Indikator sub kegiatan ini tercapai 100%, yakni jumlah dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa sebanyak 75 dokumen dari target 75 dokumen. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- a. Bimbingan Teknis SIPADES 75 kalurahan
- b. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Musrenbang 150 orang

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp 97.449.500,- dan terealisasi sebesar Rp96.887.000,- atau 99,42%. Indikator sub kegiatan ini tercapai 100%, yakni jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa sebanyak 75 dokumen dari target 75 dokumen. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- a. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa 75 orang
- b. Fasilitasi pendampingan Dana Desa dan ADD di 75 kalurahan
- c. Sosialisasi DIKAL 75 kalurahan dan 17 kapanewon

Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp 1.813.320.000,- dan terealisasi sebesar Rp1.803.485.076,- atau 99,46%. Deviasi terjadi karena kelebihan anggaran untuk BPJS kesehatan bagi pamong desa. Indikator sub kegiatan ini tercapai 100%, yakni Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas sebanyak 75 orang dari target 75 orang. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- a. Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Pamong 75 orang.
- b. Jumlah pembayaran BPJS Kesehatan bagi Pamong 75 orang

Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp 82.060.000,- dan terealisasi sebesar Rp82.057.500,- atau 100%. Indikator sub kegiatan ini tercapai 100%, yakni jumlah laporan penyelenggaraan musyawarah desa sebanyak 75 laporan dari target 75 laporan. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa penyelenggaraan Musyawarah Desa 75 kalurahan.

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp 633466280,- dan terealisasi sebesar Rp628716028,- atau 99,25%. Indikator sub kegiatan ini tercapai 100%, yakni Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa sebanyak 2 dokumen dari target 2 dokumen. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- a. Bimbingan Teknis Anggora Bumdes 60 orang
- b. pembelian kantong sampah 660 buah
- c. pembelian keranjang sedekah sampah 75 unit
- d. Pelatihan Pemberdayaan Bumdes 10 lokasi
- e. Bimbingan Teknis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Perdesaan 60 orang
- f. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Bumdes 240 orang
- g. Bimbingan Teknis Program Gotong Royong 80 orang
- h. Pelatihan Bumdes 288 orang
- i. Sosialisasi Bumdes Wijirejo 30 orang
- j. Peningkatan Kapasitas Pengurus Pamaskarta dan Study Komparasi PAB Tingkat Kabupaten Bantul di Magelang

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp 276.080.000,- dan terealisasi sebesar Rp262.292.500,- atau 95,1%. Indikator sub kegiatan ini tercapai 100%, yakni Jumlah

Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebanyak 1 laporan dari target 1 laporan. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- a. pembuatan Aplikasi Pemilihan Lurah 1 aplikasi
- b. Bimbingan Teknis Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah 300 orang
- c. Bimbingan Teknis Lurah Terpilih 21 orang
- d. Pelantikan Lurah terpilih 21 orang

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp 94.148.500,- dan terealisasi sebesar Rp86.361.000,- atau 91,73%. Deviasi antara target dan realisasi disebabkan karena narasumber dari luar Bantul tidak dapat hadir pada saat pelaksanaan acara sehingga honorarium tidak dapat dibayarkan. Narasumber kemudian digantikan oleh PNS dari Kabupaten Bantul. Indikator sub kegiatan ini tercapai 100%, yakni Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebanyak 1 laporan dari target 1 laporan. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa bimbingan Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 300 orang.

Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp 51.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp51.840.000,- atau 99,98%. Indikator sub kegiatan ini tercapai 100%, yakni Jumlah Dokumen Profil Desa sebanyak 75 dokumen dari target 75 dokumen. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- a. Evaluasi profil desa untuk 75 kalurahan
- b. Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Desa 75 kalurahan

Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp 20.608.000,- dan terealisasi sebesar Rp20.608000,- atau 100%. Indikator sub kegiatan ini tercapai 100%, yakni Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas sebanyak 75 orang dari target 75 orang. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa Peningkatan Kapasitas Anggota Bamuskal 75 orang.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp 1.356.164.746- dan terealisasi sebesar Rp1.355.161746,- atau 99,93%. Deviasi terjadi karena sisa dari pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan Kajian PAB (Pengelolaan Air Bersih), dan pengadaan keranjang sedekah

sampah. Indikator sub kegiatan ini tercapai 100%, yakni Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/ Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan oleh Desa sebanyak 5 dokumen dari target 5 dokumen. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- a. pembangunan Sumur Bor dan Jaringan Air Bersih 4 lokasi
- b. Peningkatan Kapasitas Pendampingan Desa 70 orang
- c. Peningkatan Kapasitas Pamaskarta Kabupaten Bantul 40 orang
- d. pelaksanaan TMMD Sengkuyung 3 tahap

Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp 309.925.000,- dan terealisasi sebesar Rp306.175.000,- atau 98,79%. Indikator sub kegiatan ini tercapai 100%, yakni Jumlah Dokumen Hasil

Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan sebanyak 17 dokumen dari target 17 dokumen. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- a. desa yang mendapatkan pendampingan lomba desa 75 kalurahan
- b. pelaksanaan lomba desa
- c. pembinaan lomba desa

Gambar 3.4 Dokumentasi Program Administrasi Pemerintahan Desa



DPMK
Kab. Bantul

Monitoring Pelaksanaan
PEMILIHAN LURAH SERENTAK
TAHUN 2022
KABUPATEN BANTUL
21 KALURAHAN | 25 SEPTEMBER 2022

[dpmkbantul](#) [Dinas PMK Bantul](#) [dpmk.bantulkab.go.id](#)

Deklarasi Damai Pemilihan Lurah

[dpmkbantul](#) [Dinas PMK Bantul](#) [dpmk.bantulkab.go.id](#)

[dpmkbantul](#) [Dinas PMK Bantul](#) [dpmk.bantulkab.go.id](#)

DPMK
Kab. Bantul

PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN LURAH MASA JABATAN TAHUN 2022 Bantul, 5 November

PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN LURAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 MASA JABATAN 2022-2028

[dpmkbantul](#) [Dinas PMK Bantul](#) [dpmk.bantulkab.go.id](#)

DPMK
Kab. Bantul

PENGUKUHAN 21 LURAH TERPILIH
SEBAGAI PEMANGKU KEISTIMEWAAAN
DIKUKUHKAN OLEH GUBERNUR DIY

[dpmkbantul](#) [Dinas PMK Bantul](#) [dpmk.bantulkab.go.id](#)

PENGUKUHAN LURAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 DAN LURAH PERANGKAT GABUNG KABUPATEN DI MUNDURHIDUP
SEBAGAI PEMANGKU KEISTIMEWAAAN
DIPEROLEH OLEH GUBERNUR DIY

[dpmkbantul](#)

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Indikator program ini adalah cakupan pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kalurahan, dari target 100% realisasi 100%. Pagu anggaran sebesar Rp 2.537.571.472,- dan terealisasi sebesar Rp2.536.626.306 atau 99,96%. Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tercapainya cakupan lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang terlibat didalam pemberdayaan masyarakat dengan target 80 persen terealisasi 80%.Pagu anggaran kegiatan ini Rp 2.537.571.472,- dan terealisasi sebesar Rp2.536.626.306 atau 99,96%. Kegiatan ini didukung oleh lima (5) sub kegiatan yaitu:

Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp 813.001.440,- dan terealisasi sebesar Rp812.978.500,- atau 100%. Indikator sub kegiatan ini tercapai 100%, yakni Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sebanyak1 dokumen dari target 1 dokumen. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- a. pendampingan pemberdayaan Posyandu dan PAUD 75 kalurahan
- b. PKK Kalurahan yang mendapatkan pendampingan P2W-KSS 6 kalurahan
- c. Pelatihan bagi Kelompok P2W-KSS 120 orang
- d. Peningkatan Kapasitas bagi Kelompok P2W-KSS 60 orang
- e. Peningkatan Kapasitas KPM 75 orang
- f. Pelatihan Pemasak PMT AS 60 orang
- g. Sosialisasi PMT bagi Anak PAUD Formal/ Non Formal Lokus Stunting 75 orang
- h. Bimbingan Teknis Peningkatan Score Card 75 orang
- i. Pelatihan Pengelolaan Posyandu KDN TPST Piyungan 80 orang
- j. Pelaksanaan Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten
- k. Pendampingan Lomba Posyandu Tingkat Provinsi
- l. Pendampingan Lomba Kader Posyandu Tingkat Nasional
- m. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokus Stunting 9.753 anak

- n. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) KDN TPST Piyungan Dusun Banyak III 53 balita, Dusun Ngablak 80 balita

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp 167.305.000,- dan terealisasi sebesar Rp167.304.500,- atau 100%. Indikator sub kegiatan ini tercapai 100%, yakni Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya sebanyak 3 lembaga dari target 3 lembaga. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- a. kalurahan yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan Posyandu dan PAUD 75 kalurahan
- b. PKK Kalurahan yang mendapatkan pendampingan P2W-KSS 6 kalurahan
- c. Pelatihan bagi Kelompok P2W-KSS 120 orang
- d. Peningkatan Kapasitas bagi Kelompok P2W-KSS 60 orang
- e. Peningkatan Kapasitas KPM 75 orang
- f. Pelatihan Pemasak PMT AS 60 orang
- g. Sosialisasi PMT bagi Anak PAUD Formal/ Non Formal Lokus Stunting 75 orang
- h. Bimbingan Teknis Peningkatan Score Card 75 orang
- i. Pelatihan Pengelolaan Posyandu KDN TPST Piyungan 80 orang
- j. Pelaksanaan Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten
- k. Pendampingan Lomba Posyandu Tingkat Provinsi
- l. Pendampingan Lomba Kader Posyandu Tingkat Nasional
- m. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokus Stunting 9.753 anak
- n. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) KDN TPST Piyungan Dusun Banyak III 53 balita, Dusun Ngablak 80 balita
- o. Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan Anggota LKK 360 orang
- p. kalurahan yang mengikuti seleksi Tokoh Pemberdayaan Masyarakat (Tobermas) 75 kalurahan
- q. Musyawarah Kerja DPD LPM 50 orang
- r. Peningkatan Kapasitas DPC LPM Kapanewon 100 orang
- s. Peningkatan Kapasitas Pengurus DPD 40 orang
- t. Peningkatan Kapasitas LPM Kalurahan 75 orang
- u. Peningkatan Kapasitas LPM Kalurahan di Mangunan 30 orang
- v. Peningkatan Kapasitas LPM Kalurahan di Tirtonirmolo 30 orang
- w. Peningkatan Kapasitas TP PKK 75 orang

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp 834.627.000,- dan terealisasi sebesar Rp834.627000,- atau 100%. Indikator sub kegiatan ini tercapai 100%, yakni Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- a. Bimbingan Teknis Kapasitas P2W-KSS 50 orang
- b. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas UP2K-PKK 150 orang
- c. Pelaksanaan forum posyandu 17 lokasi
- d. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pelaku Pasar Desa 56 orang
- e. Mobilitas Training Pedagang Pasar Desa 80 orang

Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp 77.946.000,- dan terealisasi sebesar Rp77.946.000,- atau 100%. Indikator sub kegiatan ini tercapai 100%, yakni Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sebanyak 1 laporan dari target 1 laporan. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- a. Bimbingan Teknis Pelatihan Keterampilan Hasil Pertanian dan Peternakan yang Berbasis Teknologi Tepat Guna (TTG) 160 orang
- b. Pelatihan Keterampilan Hasil Pertanian dan Peternakan Berbasis Teknologi Tepat Guna (TTG) 100 orang
- c. Lomba Teknologi Tepat Guna 17 orang

Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp 644.692.032,- dan terealisasi sebesar Rp643.770.306,- atau 100%. Indikator sub kegiatan ini tercapai 100%, yakni Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

- a. Pendampingan Penyelenggaraan Gerakan PKK Tim Penggerak PKK 93 TP PKK
- b. Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah Bagi Kader PKK 480 orang
- c. Bimbingan Teknis Pengembangan Kehidupan Berkoperasi 35 orang
- d. Monitoring Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana 54 orang
- e. Pelatihan AKU HATINYA PKK dan Tata Laksana Rumah Tangga 255 orang
- f. Pelatihan Manajemen Usaha bagi Pengurus Poskus UP2K PKK 99 orang
- g. Pelatihan Pemberdayaan Lansia Produktif 95 orang

- h. Pelatihan Pengelolaan Sampah 127 orang
- i. Pelatihan Simulasi Pola Asuh Anak dan Remaja 95 orang
- j. Pembinaan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Lokasi Pilot Project 54 orang
- k. Pembinaan Kelompok BKB 75 orang
- l. Pembinaan UP2K PKK tebaik 10 orang
- m. Pengembangan Kampung Tematik Tingkat Kalurahan 92 orang
- n. Penguatan Kader Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Lokasi Pilot 54 orang
- o. Penguatan Peran Posyandu dalam Penurunan AKI AKB 92 orang
- p. Peningkatan Peran PKK dalam Asman TOGA (Asuhan Mandiri TOGA) 92 orang
- q. Peningkatan Peran TPK (Tim Pendamping Keluarga) dalam Pencegahan Stunting 92 orang
- r. Penyuluhan Penundaan Usia Perkawinan/ Pencegahan Perkawinan Anak 95 orang
- s. Seminar Pendidikan bagi Pendidik PAUD 82 orang
- t. Sosialisasi Gemarikan 92 orang
- u. Sosialisasi Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana 92 orang
- v. Sosialisasi Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Lokasi Pilot Project Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup 48 orang
- w. Sosialisasi Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Lokasi Pilot Project Bidang Kesehatan 48 orang
- x. Sosialisasi Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Lokasi Pilot Project Bidang Perencanaan Sehat 48 orang
- y. Sosialisasi Hasil Rakernas 120 orang
- z. Workshop Kepemimpinan bagi Ketua TP PKK Kapanewon dan Kalurahan 110 orang
- aa. Pelaksanaan Lomba Simulasi Pola Asuh Anak Remaja (PAAR)
- ab. Pelaksanaan Lomba Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 10 Program Pokok PKK
- ac. Pelaksanaan Lomba Pelaksana Terbaik Kegiatan Pokja
- ad. Pelaksanaan Lomba Kampung AKU HATINYA PKK
- ae. Pelaksanaan Lomba Pengelolaan Sampah
- af. Pelaksanaan Lomba UP2K-PKK Terbaik

Gambar 3.5
 Dokumentasi Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat





Realisasi pelaksanaan program **Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Tahun 2022** :

PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN

Indikator program ini adalah Persentase ketersediaan bidang tanah kalurahan berdasarkan hasil inventarisasi. dengan target 16% terealisasi 16% atau 100%. Pagu anggaran sebesar Rp526.250.00,- dan terealisasi sebesar Rp521.903.650,- atau 99,17%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Kegiatan Pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tercapainya Kinerja Perencanaan Tata Ruang SRS Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan target 100% terealisasi 100%. Pagu anggaran kegiatan ini Rp526.250.00,- dan terealisasi sebesar Rp521.903.650,- atau 99,17%. Kegiatan ini didukung oleh satu (2) sub kegiatan yaitu:

Sub Kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.491.750.000,- dan terealisasi sebesar Rp487.503.650,- atau 99,14%. Indikator sub kegiatan ini tercapai 100%, yakni Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa Pemasangan patok tanah batas desa di 16 kalurahan.

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp.34.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp34.400.000,- atau 99,71%. Indikator sub kegiatan ini tercapai 100%, yakni tersedianya sarana pendukung sebanyak 3 unit dari target 3 unit (komputer 1 unit, laptop .1 unit, dan printer 1 unit).

PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

Indikator program ini adalah Presentasi Kalurahan yang Melaksanakan Urusan Kelembagaan dengan target 100% terealisasi100%. Pagu anggaran sebesar Rp 1.176.354.500,- dan terealisasi sebesar Rp1.107.520.500,- atau 94,15%. Deviasi target dan realisasi ini disebabkan oleh terdapat kekosongan jabatan aparatur desa sehingga honor pelungguh tidak bisa dibayarkan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah Kalurahan yang melaksanakan urusan kelembagaan dengan target 100% terealisasi 100% atau terdapat 75 kalurahan yang telah melaksanakan urusan kelembagaan. Pagu anggaran kegiatan ini Rp 1.176.354.500,- dan terealisasi sebesar Rp1.107.520.500,- atau 94,15%.Deviasi ini terjadi karena ada kekosongan jabatan sehingga honor pelungguh tidak bisa dibayarkan. Kegiatan ini didukung oleh satu (1) sub kegiatan yaitu:

Sub Kegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul

Pagu anggaran sub kegiatan ini Rp 1.176.354.500,- dan terealisasi sebesar Rp1.107.520.500,- atau 94,15%. Adapun bentuk dan kegiatan yang dilaksanakan berupa:

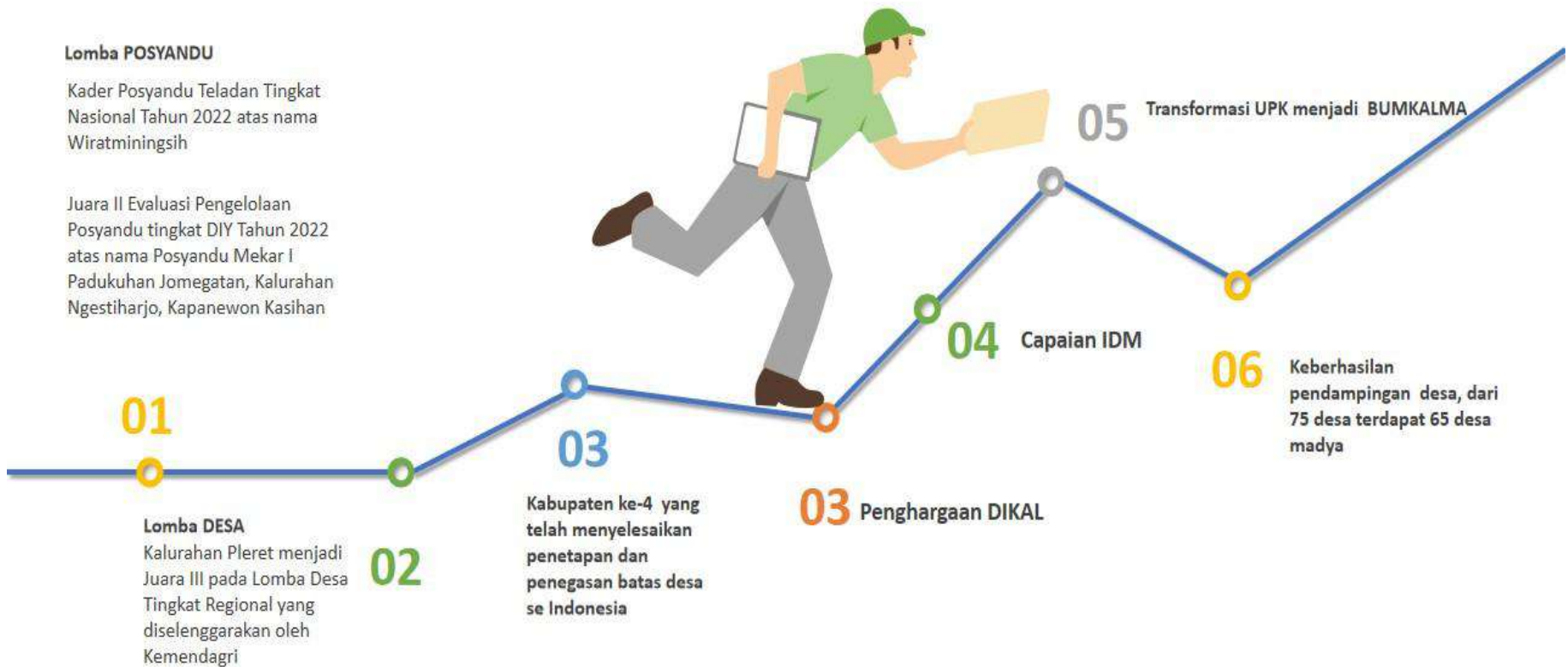
- a. Bimtek Peningkatan Kapasitas Pamong dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dalam Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan Kalurahan 150 orang.
- b. Bimtek Peran Lurah Sebagai Pemangku Keistimewaan 75 orang
- c. Peningkatan Kapasitas Danarta, Ulu-Ulu, Pangripta, Tata Laksana, Jagabaya,Kamituwa Urusan Kaistimewaan
- d. Pamong Kalurahan yang mendapatkan kompensasi pengganti pelungguh dan Pengarem-arem
- e. Pengukuhan Lurah Sebagai Pemangku Keistimewaan

INOVASI / PENGHARGAAN

Lomba POSYANDU

Kader Posyandu Teladan Tingkat Nasional Tahun 2022 atas nama Wiratminingsih

Juara II Evaluasi Pengelolaan Posyandu tingkat DIY Tahun 2022 atas nama Posyandu Mekar I Padukuhan Jomegatan, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan



3.3 Akuntabilitas Anggaran



Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
	meningkatnya jumlah desa mandiri	9.153.312.018	59.30
	Belanja Pendukung	6.282.890.346	40,70
	Total Belanja	15.436.202.364	100

Sumber: *esakip.bantulkab.go.id*, diolah.

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul sebesar Rp9.153.312.018,00 atau sebesar 59,30% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp6.282.890.346,00 atau sebesar 40,70% dari total belanja.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	33	65	196,97	9.153.312.018	9.037.447.806	98,73

Sumber: *esakip.bantulkab.go.id*, diolah.

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul sebesar Rp9.153.312.018,- dan terealisasi sebesar Rp9.037.447.806,- atau sebesar 98,73%. Selanjutnya jika dilihat dari total anggaran sasaran

dan anggaran pendukung, dari alokasi sebesar Rp15.436.202.364,- terserap sebesar 14.319.378.838,- (92,76%).

Belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 4.635.573.819,- teralisasi sebesar 3.647.159.506,- atau 78,68%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas akuntabilitas keuangan dapat menggunakan rumus rasio efektifitas berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 2006:

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Pengukuran tersebut menggunakan kategori nilai sebagai berikut :

- (1) Sangat tidak efektif (0 – 40%)
- (2) Tidak efektif (40% - 60%)
- (3) Cukup efektif (60% - 80%)
- (4) Efektif (80% - 100%)
- (5) Sangat efektif (> 100%)

Penyerapan anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran pada tahun 2022 sebesar 98,73% dari total anggaran belanja yang dialokasikan Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja berada pada kategori **efektif**.

3.4 Efisiensi Sumber Daya



Efisiensi belanja pada tahun 2022 sebesar 7,24 %, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1,26%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 15,93%. Efisiensi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	9.153.312.018	9.037.447.806	115.864.212	1,26
	Jumlah	9.153.312.018	9.037.447.806	115.864.212	1,26
	Belanja Pendukung	6.282.890.346	5.281.931.032	1.000.959.314	15,93
	Total Belanja	15.436.202.364	14.319.378.838	1.116.823.526	7,24

Sumber : esakip ROPK tahun 2022



BAB IV. PENUTUP



4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak satu (1) sasaran dan satu (1) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2022. Secara umum realisasi IKU telah tercapai melebihi target, atau tercapai sebesar 196,97% atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dipenuhi sesuai dengan harapan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh seluruh jajaran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja diatas. Kendala dan permasalahan yang menjadi faktor penyebab tidak tercapainya beberapa indikator kinerja akan menjadi fokus perbaikan di tahun mendatang.

4.2 *The Next Steps*

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja yang menjadi tujuan dari Laporan Kinerja ini, hasil evaluasi penting digunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan di tahun yang akan datang. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

Dalam pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul pada tahun 2022 antara lain adalah :

1. Komitmen dan dukungan pimpinan;
2. Banyaknya kalurahan yang dapat memenuhi skor IDM IKS
3. Kemitraan dan sinergi dengan mitra kerja (Bamuskal, Perangkat Kalurahan, TNI, dll);
4. Adanya fasilitasi bantuan keuangan dari APBD dan APBN dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pedukuhan, TMMD, Dana Insentif Desa, BLT DD, dan lain-lain.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam usaha meningkatkan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain :

1. Belum memadainya kualitas sumber daya manusia pamong kalurahan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, perencanaan keuangan, dan aset serta penguasaan teknologi informasi;
2. Belum optimalnya Peranan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK) ;
3. Belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi kalurahan

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi dan kolaborasi multipihak dalam sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pembangunan kalurahan;
2. Optmalisasi pemanfaatan dana desa;
3. Membangun ekosistem digital di kalurahan;
4. Bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Desa dalam hal penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, perencanaan keuangan, dan aset;
5. Optimalisaasi peningkatan kapasitas SDM pengelola LKK;
6. Optimalisasi pengelolaan BUMKal dan Pemanfaatan Pasar Desa;
7. Pelatihan keterampilan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa ;
8. Mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di kalurahan;
9. Pelaksanaan supervisi, monitoring, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian serta pengawasan.

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Kompleks II Perkantoran Pemkab Bantul
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul,
D I Yogyakarta, Kode Pos 55711
Telepon (0274)367338
Email: dpmkn@bantulkab.go.id
website: dpmk.bantulkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

ꦏꦼꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦤ꧀ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦤ꧀ꦏꦼꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦤ꧀ꦩꦤꦥꦼꦩꦼꦂꦸꦗꦏꦤ꧀ꦩꦱꦶꦫꦫꦏꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul D.I. Yogyakarta

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. SRI NURYANTI, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 25 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN KALURAHAN



Dra. SRI NURYANTI, M.Si
NIP. 196707101993032008

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
 Jabatan : Kepala Dinas
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Maju menjadi Desa Mandiri	Kalurahan	33	I	33
					II	33
					III	33
					IV	33*)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 526.250.000
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.282.890.346
3.	Program Penataan Desa	Rp 15.115.000
4.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp 22.451.000
5.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 4.875.570.046
6.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp 2.537.571.472
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Rp 1.176.354.500
	Jumlah Anggaran	Rp 15.436.202.364

- *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.


Bantul, 25 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KALURAHAN



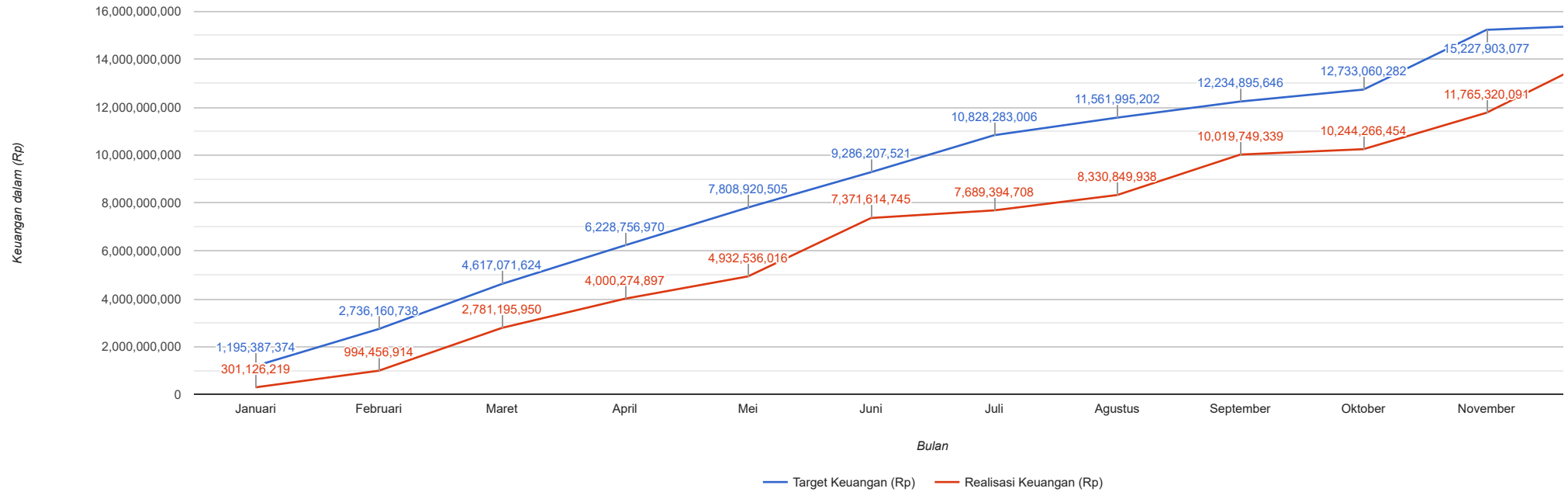
Dra. SRI NURYANTI, M.Si
NIP 196707101993032008

Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
Periode 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	Jumlah Desa Maju Menjadi Desa Mandiri	Kalurahan	33	43	53	63	73

Grafik Perkembangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Tahun 2022

Kembali (/s2022/monev-grafik/index)



Laporan Realisasi Program/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
1	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN*	526.250.000	100,00	100,00	0,00	526.250.000	100,00	521.903.650	99,17	0,83				
1.1	2.10.11.2.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*	491.750.000	100,00	100,00	0,00	491.750.000	100,00	487.503.650	99,14	0,86	Kabupaten Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Kelompok Substansi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan	1. Kepastian Hukum dan Administrasi Batas Wilayah Desa Budaya dan Rintisan Desa Budaya : 12 Orang dari 12 Orang	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Pemasangan Patok Batas Wilayah Desa Budaya (lokasi pemasangan di Desa Trimurti, Srigading, Seloharjo, Mulyodadi, Gilangharjo, Triwidadi, Sabdodadi, Selopamiro, Dlingo, Stimulyo, Panggungharjo, dan Bangunjiwo. - Pelaksanaan Pemasangan Patok Batas Wilayah Desa Budaya - Pembayaran Honorarium tim Pokja pemasangan patok, honorarium penunjuk batas, dan honorarium pemasangan patok. - Rakor tindak lanjut pengarah Gubernur pada Pengukuhan Lurah - Evaluasi pemasangan patok batas wilayah desa budaya <p>Faktor Penghambat: Mundurinya proses pengadaan patok desa (tidak sesuai ROPK).</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan patok desa melalui e-PL dalam sistem LPSE. - Koordinasi yang intensif dengan propinsi, kecamatan, dan kalurahan. - Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung. - SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif. - Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer dll) yang mendukung.
1.2	2.10.11.2.01.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan*	34.500.000	100,00	100,00	0,00	34.500.000	100,00	34.400.000	99,71	0,29	Kabupaten Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Kelompok Substansi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan	1. Sarana Pendukung : 3 Unit dari 3 Unit	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terlaksananya penyediaan komputer, laptop dan printer <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tidak ada faktor penghambat yang berarti <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kecepatan Penyedia dalam menyediakan barang - Tersedia anggaran dalam DPA
2	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.282.890.346	100,00	100,00	0,00	6.282.890.346	100,00	5.281.931.032	84,07	15,93				
2.1	2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.347.032	100,00	100,00	0,00	60.347.032	100,00	60.321.780	99,96	0,04	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Subbagian Program dan Keuangan	1. DPPA : 1 DPPA dari 1 DPPA 2. Evaluasi Renja : 4 Dokumen dari 4 Dokumen 3. Jasa Non ASN : 12 Bulan dari 12 Bulan 4. RKA : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 5. DPA : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 6. Jaminan/ Asuransi : 12 Bulan dari 12 Bulan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas lurah dan pamong Rapat koordinasi terkait Dukuh Mulekan II Tirtosari Rapat koordinasi Terkait Surat Permohonan dari Paguyuban Ulu-Ulu "Resi Seto" Updating Data Simpamong Kalurahan Penggandaan <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer dll) yang kurang mendukung <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung Realisasi fisik sudah sesuai dengan target SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif
Jumlah			15.436.202.364	98,83	98,83		15.436.202.364	100,00	14.319.378.838	92,76					

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.2	2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000	100,00	100,00	0,00	8.000.000	100,00	8.000.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Subbagian Program dan Keuangan	1. Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ, LPPD, AKIP), Laporan Barang dan Aset : 5 Dokumen dari 5 Dokumen	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1.- Terelesaikannya LPPD</p> <p>2. Dokumen LKJ IP - Penyusunan tim pelaksana kerja - Penyusunan LKjIP - Terelesaikannya LKjIP</p> <p>3. Konsep/Bahan LKPJ - Persiapan pembuatann konsep/bahan LKPJ (tahunan) - Tersampaikannya bahan materi penyusun LKPJ (tahunan) ke Bappeda</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi program/kegiatan/subkegiatan tiap bulan</p> <p>5. Terelesaikannya isian Form E-81 triwulan I, II, III</p> <p>6. Terelesaikannya isian aplikasi esakip sampai triwulan III</p> <p>7. Rakor percepatan realisasi anggaran TA 2022</p> <p>8. Rapat desk evaluasi fisik dan keuangan sd November 2022</p> <p>Faktor Penghambat: Efisiensi Rp 37.500 dari makan minum rapat</p> <p>Faktor Pendukung: Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung penyusunan dokumen evaluasi Perangkat Daerah. Realisasi fisik sudah sesuai dengan target.SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer dll) yang mendukung</p>
2.3	2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.635.573.819	100,00	100,00	0,00	4.635.573.819	100,00	3.647.159.506	78,68	21,32	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Subbagian Program dan Keuangan	1. Gaji : 14 Bulan dari 14 Bulan 2. Tunjangan Kinerja : 14 Bulan dari 14 Bulan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Pegawai DPMK Kab. Bantul</p> <p>Faktor Penghambat: Besarnya anggaran gaji yang dialokasikan untuk OPD DPMK</p> <p>Faktor Pendukung: 1. Permendagri No 90 Tahun 2019 2. Kemendagri No 050 3708 Tahun 2020 ttg Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikikasi dan Nomenklatur; 2.DPA; 3. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif 4. Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer, jaringan internet) yang mendukung 5. SE yang menerangkan bahwa gaji dan tunjangan tidak masuk dalam evaluasi kinerja.</p>
2.4	2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	267.688.500	100,00	100,00	0,00	267.688.500	100,00	259.566.220	96,97	3,03	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Subbagian Umum dan Kepegawaian	1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : 12 Jenis dari 12 Jenis	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Terlaksananya pengadaan PC Komputer</p> <p>2. Terlaksananya pengadaan Laptop</p> <p>3. Terlaksananya pengadaan Printer</p> <p>4. Terlaksananya pengadaan AC</p> <p>5. Rapat Koordinasi</p> <p>6. Pembelian Alat Ukur</p> <p>7. Pembelian Mebel</p> <p>8. Pembelian Alat Sound</p> <p>9. Pembelian TV</p> <p>Faktor Penghambat: Semua pengadaan telah selesai 100%. Saat ini menunggu untuk pengadaan yang dilaksanakan setelah DPA Perubahan 2022 disahkan.</p> <p>Faktor Pendukung: DPA 2022. Realisasi fisik sudah sesuai dengan target. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer dll) yang mendukung</p>
Jumlah			15.436.202.364	98,83	98,83		15.436.202.364	100,00	14.319.378.838	92,76					

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.5	2.13.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.532.000	100,00	100,00	0,00	17.532.000	100,00	17.532.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Subbagian Umum dan Kepegawaian	1. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih : 20 Jenis dari 20 Jenis	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Bahan Pembersih</p> <p>Faktor Penghambat: Sub kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai ROPK dan selesai pada bulan September 2022. Penyediaan peralatan rumah tangga dan bahan pembersih untuk triwulan IV menunggu anggaran perubahan 2022 disetujui.</p> <p>Faktor Pendukung: DPA 2022. Realisasi fisik sudah sesuai dengan target. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif. Sarana dan Prasarana yang mendukung.</p>
2.6	2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.030.000	100,00	100,00	0,00	21.030.000	100,00	21.021.000	99,96	0,04	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Subbagian Umum dan Kepegawaian	1. Penggandaan : 52708 Lembar dari 52708 Lembar 2. Barang Cetak : 5 Jenis dari 5 Jenis	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Penggandaan surat-surat/dokumen lainnya 2. Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak</p> <p>Faktor Penghambat: Realisasi fisik sesuai dengan target bulan September. Deviasi keuangan sebesar Rp 4.000,-</p> <p>Faktor Pendukung: DPA 2022. Realisasi fisik sudah sesuai dengan target. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif. Sarana dan Prasarana yang mendukung.</p>
2.7	2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	100,00	100,00	0,00	1.800.000	100,00	1.800.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Subbagian Umum dan Kepegawaian	1. Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar : 12 Bulan dari 12 Bulan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian buku peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan</p> <p>Faktor Penghambat: Tidak berlangganan surat kabar karena berita diakses melalui internet. Deviasi sebesar Rp1.800.000 telah digeser pada saat penyusunan RKA P 2022.</p> <p>Faktor Pendukung: - DPA - Penyediaan bahan bacaan disesuaikan dengan kebutuhan.</p>
2.8	2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	340.615.025	100,00	100,00	0,00	340.615.025	100,00	339.905.637	99,79	0,21	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Subbagian Umum dan Kepegawaian	1. Perjalanan Ke Luar Daerah : 5 Kegiatan dari 5 Kegiatan 2. Penyediaan Makan Minum Tamu : 275 Orang dari 275 Orang 3. Laporan Hasil Rapat : 18 Dokumen dari 18 Dokumen 4. Perjalanan Ke Dalam Daerah : 9 Kegiatan dari 9 Kegiatan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2. Tersedianya makan minum tamu 3. Tersedianya makan minum rapat 4. Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah 5. Koordinasi Monev Kabupaten Layak Anak 6. Rapat Koordinasi Persiapan HUT Korpri 7. Rapat koordinasi nasional TP PKK (Rakornas TP PKK) thn 2022 di Jakarta</p> <p>Faktor Penghambat: --Realisasi fisik tidak sesuai dengan target bulan September. Deviasi keuangan sebesar Rp 10.283.250,- berasal dari perjalanan dinas luar daerah.</p> <p>Faktor Pendukung: DPA 2022. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif. Sarana dan Prasarana yang mendukung Banyaknya kegiatan monitoring yang dilakukan ke kalurahan di Kab Bantul Banyaknya OPD dari Kabupaten Lain yang melaksanakan studi banding ke DPMK Bantul</p>
2.9	2.13.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.074.880	100,00	100,00	0,00	26.074.880	100,00	25.971.250	99,60	0,40	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Subbagian Umum dan Kepegawaian	1. Gedung Kantor : 1 Unit dari 1 Unit	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tahapan fisik telah selesai pada bulan Juni</p> <p>Faktor Penghambat: Terdapat sisa anggaran pengadaan area parkir</p> <p>Faktor Pendukung: Tersedianya dukungan anggaran</p>
Jumlah			15.436.202.364	98,83	98,83		15.436.202.364	100,00	14.319.378.838	92,76					

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.10	2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	100,00	100,00	0,00	3.000.000	100,00	3.000.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Subbagian Umum dan Kepegawaian	1. Benda Pos : 500 Buah dari 500 Buah	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Penata Usaha Surat Keluar 2. Terlaksananya Penatausahaan Surat Masuk 3. Terlaksananya Pengiriman surat/dokumen lainnya 4. Terlaksananya Pengadaan Benda Pos <p>Faktor Penghambat: Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan September. Deviasi keuangan sebesar Rp1.000.000,- karena bersifat persediaan dan sesuai kebutuhan, sehingga anggaran telah digeser pada RKA P 2022.</p> <p>Faktor Pendukung: - DPA - Penyediaan benda pos disesuaikan dengan kebutuhan</p>
2.11	2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.999.000	100,00	100,00	0,00	9.999.000	100,00	9.499.000	95,00	5,00	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Subbagian Umum dan Kepegawaian	1. Pembayaran Rekenign Telepon : 1 Bulan dari 1 Bulan 2. Penyediaan Alat Listrik : 3 Jenis dari 3 Jenis	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - terlaksananya penyediaan peralatan listrik</p> <p>Faktor Penghambat: Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan September. Deviasi keuangan Rp1.500.000,- merupakan anggaran untuk pembayaran tagihan telepon. Saat ini tagihan telepon DPMK dibayar oleh BPKPAD.</p> <p>Faktor Pendukung: - DPA 2022</p>
2.12	2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.322.400	100,00	100,00	0,00	62.322.400	100,00	62.322.400	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Subbagian Umum dan Kepegawaian	1. Alat Tulis Kantor : 3 Kegiatan dari 3 Kegiatan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan alat tulis kantor</p> <p>Faktor Penghambat: -Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan Agustus. Deviasi keuangan Rp 5.600,-.</p> <p>Faktor Pendukung: - DPA - Realisasi fisik sudah sesuai dengan target - SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif</p>
2.13	2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	218.483.160	100,00	100,00	0,00	218.483.160	100,00	218.345.388	99,94	0,06	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Subbagian Umum dan Kepegawaian	1. Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya : 12 Dokumen dari 12 Dokumen 2. Laporan Perawatan Kendaraan : 12 Dokumen dari 12 Dokumen 3. Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor : 12 Dokumen dari 12 Dokumen 4. Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar : 12 Dokumen dari 12 Dokumen 5. Jasa Pengelola Administrasi Keuangan dan Barang / Jasa : 18 Orang dari 18 Orang	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Pembayaran honorarium penanggungjawab pengelola keuangan (PA, PPK, PPTK, Bendahara, dll) - Pembayaran jasa tenaga non ASN - Pembayaran BPJS Kesehatan bagi tenaga non ASN - Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga non ASN - Pembayaran BPJS Kematian bagi tenaga non ASN</p> <p>Faktor Penghambat: Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan September. Deviasi keuangan sebesar Rp 10.311.226,- yang merupakan efisiensi dari honorarium PPTK.</p> <p>Faktor Pendukung: Tersedianya dukungan anggaran. Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung Realisasi fisik sudah sesuai dengan target SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer dll) yang mendukung)</p>
2.14	2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	298.099.450	100,00	100,00	0,00	298.099.450	100,00	297.108.711	99,67	0,33	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Subbagian Umum dan Kepegawaian	1. Bahan Bakar Minyak : 23516 Liter dari 23516 Liter 2. Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 : 3 Unit dari 3 Unit 3. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 : 3 Unit dari 3 Unit 4. Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 : 10 Unit dari 10 Unit 5. Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 : 7 Unit dari 10 Unit	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian BBM bagi kendaraan roda 4 dan 2 Pemeliharaan (suku cadang dan servis kendaraan roda 4 dan 2 Perpanjangan STNK dan pajak kendaraan roda 4 dan 2</p> <p>Faktor Penghambat: Penyerapan anggaran servis kendaraan roda dua tidak banyak terserap karena sedikitnya aset kendaraan roda 2 yang dimiliki</p> <p>Faktor Pendukung: Tersedianya dukungan anggaran Realisasi fisik sudah sesuai dengan target SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif</p>
Jumlah			15.436.202.364	98,83	98,83		15.436.202.364	100,00	14.319.378.838	92,76					

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
2.15	2.13.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.110.000	100,00	100,00	0,00	34.110.000	100,00	34.110.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Subbagian Umum dan Kepegawaian	1. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : 8 Jenis dari 8 Jenis	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pemeliharaan AC (Pendingin Ruangan) Pemeliharaan PC komputer dan Laptop Pemeliharaan printer Pemeliharaan mebelair</p> <p>Faktor Penghambat: Realisasi fisik sudah sesuai dengan target bulan September. Deviasi keuangan sebesar Rp 31.000,- yang merupakan efisiensi dari pemeliharaan AC.</p> <p>Faktor Pendukung: Tersedianya dukungan anggaran Realisasi fisik sudah sesuai dengan target SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif</p>
2.16	2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	278.215.080	100,00	100,00	0,00	278.215.080	100,00	276.268.140	99,30	0,70	Kabupaten Bantul	Sekretariat - Subbagian Umum dan Kepegawaian	1. Gedung Kantor : 1 Unit dari 1 Unit	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - pemeliharaan ruang rapat dinas - Pengecatan dinding ruangan kerja - Belanja papan penanda bangunan - Persiapan renovasi ruang kerja Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Ruang Tamu</p> <p>Faktor Penghambat: Deviasi sebesar Rp 1.868.715,- merupakan efisiensi dari pekerjaan pengecatan.</p> <p>Faktor Pendukung: Tersedianya dukungan anggaran SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif</p>
3	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	15.115.000	100,00	100,00	0,00	15.115.000	100,00	15.115.000	100,00	0,00				
3.1	2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	15.115.000	100,00	100,00	0,00	15.115.000	100,00	15.115.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Kelompok Substansi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan	1. Kalurahan yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Kewenangan Desa (Produk Hukum, Aset Kal, Batas Kal) : 75 Kalurahan dari 75 Kalurahan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Terlaksananya sosialisasi terkait Penyelenggaraan Kewenangan Desa (Produk Hukum, Batas Kal) kepada 75 Kalurahan.</p> <p>Faktor Penghambat: Sisa anggaran Rp 1.000.000,- merupakan efisiensi dari uang saku peserta bimtek, akan digeser pd saat perubahan 2022</p> <p>Faktor Pendukung: - Tersedianya anggaran dalam DPA - Koordinasi yang baik dengan stakeholders terkait (kapanewon dan kalurahan) - Antusiasme peserta sosialisasi</p>
4	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	22.451.000	100,00	100,00	0,00	22.451.000	100,00	22.201.000	98,89	1,11				
4.1	2.13.03.2.01.01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	22.451.000	100,00	100,00	0,00	22.451.000	100,00	22.201.000	98,89	1,11	Kabupaten Bantul	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan - Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya, Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna	<p>1. Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas BKAD dan BPUPK meningkat 100% dari 34 Orang : 34 Orang dari 34 Orang</p> <p>2. Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK Meningkat 100% dari 70 Orang : 70 Desa dari 70 Desa</p> <p>3. Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Kerjasama Antar Desa : 25 Desa dari 25 Desa</p> <p>4. Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK meningkat sebanyak 100% dari 51 Orang : 51 Orang dari 51 Orang</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pelaksanaan rapat koordinasi Transformasi UPK menjadi BUMDesma Pelaksanaan bimtek UPK Bimtek Peningkatan Kapasitas BKPD, BP UPK dan UPK Kabupaten Bantul Pembayaran kegiatan untuk bulan Oktober</p> <p>Faktor Penghambat: Terdapat deviasi keuangan sebesar Rp1.450.000,- yang merupakan efisiensi dari honor narasumber dan uang saku peserta bimtek.</p> <p>Faktor Pendukung: - Amanat Transformasi UPK Menjadi BUMDesma(Badan Usaha Milik Desa Bersama) tercantum dalam PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama(BUMDesma). Pokok pikiran PP tersebut adalah Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan ini diundangkan. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah fasilitasi UP2PKK (kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK - Tersedianya anggaran dalam DPA. - Koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder yang solid.</p>
Jumlah			15.436.202.364	98,83	98,83		15.436.202.364	100,00	14.319.378.838	92,76					

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
5	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.875.570.046	96,28	96,28	0,00	4.875.570.046	100,00	4.834.081.350	99,15	0,85				
5.1	2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	110.370.500	100,00	100,00	0,00	110.370.500	100,00	110.370.500	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Kelompok Substansi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan	1. Kalurahan yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Laporan Lurah dan SID) : 75 Kalurahan dari 75 Kalurahan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran transport peserta Bimtek SIPADES Pembelian ATK Kegiatan Penggandaan Materi Rapat Koordinasi Honorarium Narasumber Bimbingan Teknis Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Pelaksanaan pelatihan SIPADES</p> <p>Faktor Penghambat: Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer dll) yang kurang mendukung. Sisa uang transport kegiatan Rp. 1.000.000,- karena efisiensi, digeser pada anggaran perubahan.</p> <p>Faktor Pendukung: Tersedianya dukungan anggaran Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung . Realisasi fisik sudah sesuai dengan target. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif.</p>
5.2	2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	30.127.520	100,00	100,00	0,00	30.127.520	100,00	30.127.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Kelompok Substansi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan	1. Pamong Desa yang Mendapatkan Bimtek Penyelenggaraan Musrenbang : 150 Orang dari 150 Orang	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Bumdes Perjalanan Dinas Luar Daerah Study Komparasi ke Bumdes Pujon Malang Sosialisasi BUM Desa Pelaksanaan Bimtek G2R Pembelian ATK kegiatan pembinaan dan pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa Pelaksanaan pelatihan pemberdayaan BUMDes Pembayaran jasa tenaga non ASN beserta jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan Rapat koordinasi perencanaan pembangunan kalurahan</p> <p>Faktor Penghambat: - Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer dll) yang kurang mendukung - Kapasitas dan kemampuan SDM pengelola BUMdes yang terbatas</p> <p>Faktor Pendukung: Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung . Realisasi fisik sudah sesuai dengan target. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif.</p>
5.3	2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	97.449.500	100,00	100,00	0,00	97.449.500	100,00	96.887.000	99,42	0,58	Kabupaten Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Kelompok Substansi Pengelolaan Keuangan Kalurahan	1. Kalurahan yang terfasilitasi pendampingan Dana Desa dan ADD : 75 Kalurahan dari 75 Kalurahan 2. Pamong Kalurahan yang Mendapatkan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa : 75 Orang dari 75 Orang	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian ATK Kegiatan Penggandaan Surat Dinas Rapat Koordinasi Bimtek Pengelolaan Keuangan Kalurahan Honorarium Narasumber Bimtek Pengelolaan Keuangan Kalurahan Pelaksanaan Sosialisasi Dikal Perjalanan dinas dalam daerah Pembelian tinta printer Rapat koordinasi pembahasan Perbub DIKAL Pelatihan aplikasi penutupan kas Rapat koordinasi pemeriksaan Kas Semester I rakor pencocokan data tanah kas kalurahan yang digunakan untuk fasum</p> <p>Faktor Penghambat: Sarana dan Prasarana (komputer, laptop, printer dll) yang kurang mendukung</p> <p>Faktor Pendukung: Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung. Realisasi fisik sudah sesuai dengan target. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif.</p>
Jumlah			15.436.202.364	98,83	98,83		15.436.202.364	100,00	14.319.378.838	92,76					

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.4	2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.813.320.000	90,00	90,00	0,00	1.813.320.000	100,00	1.803.485.076	99,46	0,54	Kabupaten Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Kelompok Substansi Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Kalurahan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Pemahaman Peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa : 80 Persen dari 80 Persen Meningkatnya Pemahaman Peserta Bimtek Pengawasan : 80 Persen dari 80 Persen 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran jaminan kesehatan bagi Kepala dan Perangkat Desa</p> <p>Faktor Penghambat: Anggaran untuk belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lebih besar daripada kebutuhan tahun 2022, karena data jumlah kepala dan perangkat desa yang dinamis</p> <p>Faktor Pendukung: Tersedianya dukungan anggaran</p>
5.5	2.13.04.2.01.06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	82.060.000	100,00	100,00	0,00	82.060.000	100,00	82.057.500	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Kelompok Substansi Pengelolaan Keuangan Kalurahan	<ol style="list-style-type: none"> Laporan Sosialisasi DD : 1 Dokumen dari 1 Dokumen Meningkatnya Pemahaman Peserta Bimtek Pelaporan Pelaksanaan Dana Desa : 80 Persen dari 80 Persen Laporan Pelaksanaan Dana Desa : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penggandaan raperbup dan surat-surat dinas Rapat Koordinasi Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan DD Honorarium Narasumber dan Moderator Pelaksanaan Sosialisasi Perbup Honorarium Narasumber dan Moderator Pelaksanaan Bimtek Pelaporan DD Monitoring BLT Kalurahan Monitoring DD Kalurahan Rapat Koordinasi dengan Tenaga Ahli PMD Pembayaran Honor Tim Pelaksanan Kegiatan dan Sekreatiat Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa Tahun 2022 Rapat Koordinasi pendampingan Muskal Pembelian ATK Musdes Rakor evaluasi penyerapan dana desa tahun 2022</p> <p>Faktor Penghambat: Menunggu anggaran perubahan disetujui</p> <p>Faktor Pendukung: Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung. Realisasi fisik sudah sesuai dengan target. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif.</p>
5.6	2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	633.466.280	100,00	100,00	0,00	633.466.280	100,00	628.716.028	99,25	0,75	Kabupaten Bantul	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan - Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya, Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna	<ol style="list-style-type: none"> Pemahaman Peserta Bimtek Pemberdayaan Usaha Ekonomi Pedesaan Meningkat 80% dari 75 Orang : 60 Orang dari 60 Orang Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Bumdes Meningkat 80% dari 300 orang : 240 Orang dari 240 Orang Pemahaman Peserta Pelatihan Bumdes Meningkat 80% dari 360 Orang : 288 Orang dari 288 Orang Pelatihan Pemberdayaan Bumdes : 6 Lokasi dari 10 Lokasi Pemahaman Peserta Bimtek Program Global Gotong Royong Meningkat 80% dari 100 Orang : 80 Orang dari 80 Orang Jasa Tenaga Administrasi : 12 Bulan dari 12 Bulan Sosialisasi Bumdes Wjirejo : 30 Orang dari 30 Orang 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Sosialisasi BUM Desa Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Bumdes Honorarium Narasumber Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDes Pembayaran jasa tenaga non ASN beserta jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan Perjalanan Dinas Luar Daerah Study Komparasi ke Bumdes Pujon Malang Pelaksanaan Bimtek G2R Pembelian ATK kegiatan pembinaan dan pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa Pelaksanaan pelatihan pemberdayaan BUMDes Peningkatan Kapasitas Bumkal Pengadaan Keranjang Sedekah Sampah Pengadaan Kantong Plastik Sampah</p> <p>Faktor Penghambat: Pembayaran Kantong Plastik Sampah dibulan Desember</p> <p>Faktor Pendukung: Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung. Realisasi fisik sudah sesuai dengan target. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif</p>
Jumlah			15.436.202.364	98,83	98,83		15.436.202.364	100,00	14.319.378.838	92,76					

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.7	2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	276.080.000	100,00	100,00	0,00	276.080.000	100,00	262.292.500	95,01	4,99	Kabupaten Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Kelompok Substansi Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Kalurahan	1. Peserta Koordinasi dan Bimtek Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah : 300 Orang dari 300 Orang	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi Pencermatan RAB Pilurah Th 2022 Rapat koordinasi Laporan Pertanggungjawaban Pilurah Ngestiharjo Rapat koordinasi Penandatanganan Kerjasama terkait Data Pilurah dengan KPU Rakor Persiapan Pilur Deklarasi Damai Pilur Pelaksanaan Pilur Serentak Persiapan Pengambilan Sumpah Jabatan Lurah Masa Jabatan Tahun 2022-2028 Kab. Bantul Pelantikan 21 Lurah Terpilih Bimbingan Teknis Lurah</p> <p>Faktor Penghambat: -Terdapat Kelurahan yang calonnya lima orang (Desa Bangunharjo dan Desa Gadingsari) sehingga perlu dilakukan seleksi.</p> <p>Faktor Pendukung: Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung . Realisasi fisik sudah sesuai dengan target. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif. Tersedianya aplikasi SIPIL AMPUH untuk hitung cepat hasil rekapitulasi hasil pilur. Monitoring bersama jajaran FORKOMPINDA terhadap proses pelaksanaan pilur di 24 desa Pilur dilaksanakan dengan penerapan proses yang ketat</p>
5.8	2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	94.148.500	100,00	100,00	0,00	94.148.500	100,00	86.361.000	91,73	8,27	Kabupaten Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Kelompok Substansi Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Kalurahan	1. Peserta Koordinasi dan Bimtek Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa : 300 Orang dari 300 Orang	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Peningkatan kapasitas lurah dan pamong Rapat koordinasi terkait Dukuh Mulekan II Tirtosari Rapat koordinasi Terkait Surat Permohonan dari Paguyuban Ulu-Ulu "Resi Seto" Updating Data Simpamong Kalurahan</p> <p>Faktor Penghambat: menunggu alokasi anggaran kas</p> <p>Faktor Pendukung: -</p>
5.9	2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	51.850.000	100,00	100,00	0,00	51.850.000	100,00	51.840.000	99,98	0,02	Kabupaten Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Kelompok Substansi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan	1. Laporan Evaluasi Profil Desa : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Meningkatnya Pemahaman Peserta Bimtek Profil Desa : 80 Persen dari 80 Persen 3. Meningkatnya Pemahaman Peserta Bimtek Lomba Desa/ Kalurahan : 80 Persen dari 80 Persen 4. Laporan Pelaksanaan Lomba Desa/ Kalurahan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 5. Laporan Pembinaan Lomba Desa/ Kalurahan : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rakor persiapan penyusunan profil desa tahun 2022 Bimtek Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa Tahun 2022 Bimbingan Teknis Profil Desa Rapat Koordinasi Penyusunan Profil Desa</p> <p>Faktor Penghambat: -</p> <p>Faktor Pendukung: Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung . Realisasi fisik sudah sesuai dengan target. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif.</p>
5.10	2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	20.608.000	100,00	100,00	0,00	20.608.000	100,00	20.608.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Kelompok Substansi Aparatur dan Kelembagaan Pemerintahan Kalurahan	1. Anggota Bamuskal yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas : 75 Orang dari 75 Orang	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi pengganti antar waktu Bamuskal dan cuti lurah Peningkatan kapasitas Bamuskal Rapat koordinasi persiapan pengisian Bamuskal th 2024</p> <p>Faktor Penghambat: -</p> <p>Faktor Pendukung: Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung . Realisasi fisik sudah sesuai dengan target. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif.</p>
Jumlah			15.436.202.364	98,83	98,83		15.436.202.364	100,00	14.319.378.838	92,76					

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
5.11	2.13.04.2.01.17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	1.356.164.746	100,00	100,00	0,00	1.356.164.746	100,00	1.355.161.746	99,93	0,07	Kabupaten Bantul	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan - Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan	1. Desa/ Kalurahan yang mendapatkan pendampingan bantuan keuangan kepada pemerintah Desa : 75 Desa/ Kalurahan yang dari 75 Desa/ Kalurahan yang	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembayaran jasa tenaga kontrak beserta BPJS Sosialisasi KBPM, BKK P2MK, PPBMP, TMMD Sengkuyung Tahap I Rapat Koordinasi dan Verifikasi Usulan PPBMT Tahun 2023 Kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap II di Kalurahan Terong Dlingo Rakor Koordinasi / Audiensi Penyelenggaraan Air Bersih (Air Minum Berbasis Masyarakat) Penutupan TMMD Sengkuyung Tahap II Verifikasi proposal Rapat koordinasi persiapan TMMD Sengkuyung Tahap III Bimbingan Teknis Pamaskarta Rakerda Pamaskarta Sosialisasi PAB Pembangunan PAB sudah mencapai 60%</p> <p>Faktor Penghambat: Pembangunan PAB masih 60%</p> <p>Faktor Pendukung: Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung . Realisasi fisik sudah sesuai dengan target. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif.</p>
5.12	2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	309.925.000	100,00	100,00	0,00	309.925.000	100,00	306.175.000	98,79	1,21	Kabupaten Bantul	Bidang Pemerintahan Kalurahan - Kelompok Substansi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kalurahan	1. Desa Mendapatkan Pendampingan Lomba Desa : 75 Kalurahan dari 75 Kalurahan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - technical meeting lomba kalurahan - sosialisasi lomba kalurahan - Honorarium Narsum dan Moderator - cetak buku pedoman lomba kalurahan - pleno penempatan 6 besar lomba kalurahan - Rapat koordinasi penilaian dan pleno penentuan 3 besar lomba kalurahan - Verifikasi lapangan lomba kalurahan - Persiapan Lomba Desa tingkat Provinsi di Kalurahan Pleret - Penyerahan hadiah lomba kalurahan - Lomba kalurahan tingkat DIY - Pendampingan penerimaan hadiah kejuaraan lomba desa tingkat provinsi - Lomba Desa Tingkat Regional di Kalurahan Pleret</p> <p>Faktor Penghambat: menunggu anggaran perubahan disahkan</p> <p>Faktor Pendukung: Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung . Realisasi fisik sudah sesuai dengan target. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif.</p>
6	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.537.571.472	100,00	100,00	0,00	2.537.571.472	100,00	2.536.626.306	99,96	0,04				
Jumlah			15.436.202.364	98,83	98,83		15.436.202.364	100,00	14.319.378.838	92,76					

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
6.1	2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	813.001.440	100,00	100,00	0,00	813.001.440	100,00	812.978.500	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan - Kelompok Substansi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan	<p>1. PKK Kalurahan yang Mendapatkan Pendampingan P2W-KSS : 6 PKK Kalurahan dari 6 PKK Kalurahan</p> <p>2. Kalurahan yang Mendapatkan Pendampingan Pemberdayaan Posyandu dan PAUD : 75 Kalurahan dari 75 Kalurahan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi lomba posyandu Pelatihan Memasak Menu PMT-AS Peningkatan Kapasitas KPM dalam Pelaporan Score Card Pembayaran Honor Petugas Entri Score Card Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring PMT-AS Pelaksanaan PMT-AS Pelaksanaan PMT Balita Posyandu Lokasi KDN TPST Piyungan Kunjungan lapangan lomba posyandu Pembelian alat dan bahan peraga pelatihan bagi P2WKSS Pelatihan P2WKSS Bimtek Peningkatan Pelaporan Score Card Pelaksanaan PMT Balita Lokasi KDN TPST Piyungan di dua lokasi Rapat koordinasi lomba posyandu Pelatihan Memasak Menu PMT-AS Peningkatan Kapasitas KPM dalam Pelaporan Score Card Rapat Koordinasi PMT-AS</p> <p>Faktor Penghambat: -</p> <p>Faktor Pendukung: Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung. Realisasi fisik sudah sesuai dengan target. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif.</p>
Jumlah			15.436.202.364	98,83	98,83		15.436.202.364	100,00	14.319.378.838	92,76					

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
6.2	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	167.305.000	100,00	100,00	0,00	167.305.000	100,00	167.304.500	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan - Kelompok Substansi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta yang Memahami Bimtek Pengelolaan Kegiatan PMT AS : 80 Persen dari 80 Persen 2. Peserta yang memahami Peningkatan Kapasitas Pokja dan Pokjnal Posyandu : 0 Persen dari 80 Persen 3. Seleksi TOBERMAS : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Penyelenggaraan Operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 5. Peserta yang Memahami Bimtek Keterpaduan Posyandu Bagi Kader Posyandu : 80 Persen dari 80 Persen 6. Kalurahan yang Mengikuti Seleksi Tokoh Pemberdayaan Masyarakat : 75 Kalurahan dari 75 Kalurahan 7. Lomba Posyandu : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 8. Peserta yang Memahami Bimtek Pelaporan Konvergensi Stunting : 80 Persen dari 80 Persen 9. Peserta yang Memahami Bimtek Penguatan Kelembagaan TP PKK : 80 Persen dari 80 Persen 10. Peserta yang Memahami Peningkatan Kapasitas LPM : 80 Persen dari 80 Persen 11. Peserta yang Memahami Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu : 80 Persen dari 80 Persen 12. Pemberian PMT AS Bagi Anak TK/ RA : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 13. Anggota LKK yang Mendapatkan Bimtek Penguatan Kelembagaan : 360 Orang dari 360 Orang 14. Peserta yang Memahami Pelatihan Pemasak PMT AS : 80 Persen dari 80 Persen 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: peningkatan kapasitas bagi ketua TP PKK dim mendukung Kab Layak Anak peningkatan kapasitas pengurus DPD LPM Kab Bantul Peningkatan kapasitas LPMKAl Pelaksanaan Musyawarah Kerja DPD LPM Pelaksanaan seleksi Tokoh Pemberdayaan Masyarakat Pengumuman dan Penyerahan hadiah lomba Tobermas Tahun 2022 Rakor DPD LPM (Evaluasi Pelaksanaan Seleksi Tobermas) Rakor DPD LPM (Evaluasi Gropyok Sampah bersama DPD LPM Kab Bantul) Peningkatan Kapasitas DPC LPM Kapanewon</p> <p>Faktor Penghambat: -</p> <p>Faktor Pendukung: Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung. Realisasi fisik sudah sesuai dengan target. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif.</p>
6.3	2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	-	-	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung:</p>	
Jumlah			15.436.202.364	98,83	98,83		15.436.202.364	100,00	14.319.378.838	92,76					

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi				
6.4	2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	834.627.000	100,00	100,00	0,00	834.627.000	100,00	834.627.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan - Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya, Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pelaku Pasar Desa Meningkat 80% dari 70 Orang : 56 Orang dari 56 Orang 2. Laporan Pelaksanaan Carnaval : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Pemahaman Peserta Mobilitas Training Pedagang Pasar Desa Meningkat 80% dari 120 Orang : 80 Orang dari 80 Orang 4. Laporan Pelaksanaan Bantul Expo : 0 Dokumen dari 0 Dokumen 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Rapat koordinasi persiapan BKK Pasar Desa Rapat Koordinasi Penyiapan Lokasi Program Agroforestry Kemendes Th 2022 oleh YAGASU Rapat koordinasi bantuan keuangan pasar desa Persiapan Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola Pasar Desa Kab Bantul Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola Pasar Desa Kab Bantul Pelatihan Mobile Trining Pelaku Pasar Desa Sosialisasi Pasar Desa Forum Posyandu di 15 Kalurahan Rapat Persiapan Launching Transformasi UPK Kegiatan P2WKSS Launching Transformasi UPK menjadi Bumkal Bermasa LKD</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung: Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung. Realisasi fisik sudah sesuai dengan target. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif.</p>
6.5	2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	77.946.000	100,00	100,00	0,00	77.946.000	100,00	77.946.000	100,00	0,00	Kabupaten Bantul	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan - Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya, Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Peserta Bimtek Pelatihan Keterampilan Hasil Pertanian dan Peternakan yang Berbasis TTG Meningkat 80% dari 200 Orang : 160 Orang dari 160 Orang 2. Ekspose Lomba Kreasi dan Inovasi Penemu TTG : 50 Orang dari 50 Orang 3. Lomba Tehnologi Tepat Guna : 17 Kecamatan dari 17 Kecamatan 4. Pemahaman Peserta Bimtek Pengembangan TTG Tingkat Kabupaten Bantul Meningkat 80% dari 51 Orang : 41 Orang dari 41 Orang 5. Pelatihan Keterampilan Hasil Pertanian dan Peternakan Berbasis TTG : 100 Orang dari 100 Orang 6. Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola Posyantek Meningkat 80% dari 51 Orang : 41 Orang dari 41 Orang 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: - Pelaksanaan rapat koordinasi - Belanja ATK Kegiatan - Penggandaan materi - Bimbingan teknis pengembangan TTG (Posyantek) - Honorarium Narasumber - pelatihan ketrampilan pengolahan hasil pertanian dan peternakan berbasis TTG - Persiapan Ekspose Lomba Kreasi dan Inovasi Penemu Alat Teknologi Tepat Guna Rapat koordinasi persiapan ekspose lomba kreasi dan inovasi penemu alat TTG Kab Bantul Rapat Koordinasi Tim Yuri dlm rangka persiapan ekspose lomba kreasi dan inovasi penemu alat TTG Kab Bantul Pembelian ATK Kegiatan Fasilitasi Pemerintahan Desa dlm pemanfaatan TTG Technical meeting lomba kreasi dan inovasi penemu TTG Kab Bantul Pelaksanaan ekspose lomba kreasi dan inovasi penemu TTG Kab Bantul Pemberian hadiah juara lomba kreasi dan inovasi penemu alat TTG</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Faktor Pendukung: Tersedianya materi, peraturan dan data/dokumen pendukung. Realisasi fisik sudah sesuai dengan target. SDM yang kompeten, profesional dan koordinatif.</p>
Jumlah			15.436.202.364	98,83	98,83		15.436.202.364	100,00	14.319.378.838	92,76					

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022
s/d Bulan Desember
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Tipe	Satuan	Target	Realisasi	Tgl Entri	Tgl Revisi
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN						
1.1	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten						
1.1.1	Kepastian Hukum dan Administrasi Batas Wilayah Desa Budaya dan Rintisan Desa Budaya	KELUARAN	Orang	12	12	04-10-2022	04-10-2022
1.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanian						
1.2.1	Sarana Pendukung	KELUARAN	Unit	3	3	01-07-2022	01-07-2022
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
2.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
2.1.1	DPPA	KELUARAN	DPPA	1	1	31-03-2022	31-03-2022
2.1.2	Evaluasi Renja	KELUARAN	Dokumen	4	4	17-03-2022	04-10-2022
2.1.3	Jasa Non ASN	KELUARAN	Bulan	12	12	17-03-2022	04-10-2022
2.1.4	RKA	KELUARAN	Dokumen	1	1	28-04-2022	28-04-2022
2.1.5	DPA	KELUARAN	Dokumen	1	1	31-03-2022	31-03-2022
2.1.6	Jaminan/ Asuransi	KELUARAN	Bulan	12	12	17-03-2022	04-10-2022
2.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
2.2.1	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ, LPPD, AKIP), Laporan Barang dan Aset	KELUARAN	Dokumen	5	5	04-04-2022	06-12-2022
2.3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
2.3.1	Gaji	KELUARAN	Bulan	14	14	23-03-2022	03-01-2023
2.3.2	Tunjangan Kinerja	KELUARAN	Bulan	14	14	23-03-2022	03-01-2023
2.4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
2.4.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KELUARAN	Jenis	12	12	23-03-2022	03-01-2023
2.5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
2.5.1	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	KELUARAN	Jenis	20	20	23-03-2022	03-01-2023
2.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
2.6.1	Penggandaan	KELUARAN	Lembar	52708	52708	04-04-2022	06-12-2022
2.6.2	Barang Cetak	KELUARAN	Jenis	5	5	31-03-2022	06-12-2022
2.7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Tipe	Satuan	Target	Realisasi	Tgl Entri	Tgl Revisi
2.7.1	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	KELUARAN	Bulan	12	12	04-10-2022	03-01-2023
2.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
2.8.1	Perjalanan Ke Luar Daerah	KELUARAN	Kegiatan	5	5	04-04-2022	03-01-2023
2.8.2	Penyediaan Makan Minum Tamu	KELUARAN	Orang	275	275	31-03-2022	03-01-2023
2.8.3	Laporan Hasil Rapat	KELUARAN	Dokumen	18	18	31-03-2022	03-01-2023
2.8.4	Perjalanan Ke Dalam Daerah	KELUARAN	Kegiatan	9	9	09-05-2022	03-01-2023
2.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
2.9.1	Gedung Kantor	KELUARAN	Unit	1	1	09-05-2022	09-05-2022
2.10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
2.10.1	Benda Pos	KELUARAN	Buah	500	500	23-03-2022	03-01-2023
2.11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
2.11.1	Pembayaran Rekenign Telepon	KELUARAN	Bulan	1	1	06-12-2022	06-12-2022
2.11.2	Penyediaan Alat Listrik	KELUARAN	Jenis	3	3	23-03-2022	06-12-2022
2.12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
2.12.1	Alat Tulis Kantor	KELUARAN	Kegiatan	3	3	23-03-2022	03-01-2023
2.13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
2.13.1	Laporan Kebersihan Ruang Kerja dan Fasilitas Lainnya	KELUARAN	Dokumen	12	12	23-03-2022	03-01-2023
2.13.2	Laporan Perawatan Kendaraan	KELUARAN	Dokumen	12	12	23-03-2022	03-01-2023
2.13.3	Laporan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Kantor	KELUARAN	Dokumen	12	12	23-03-2022	03-01-2023
2.13.4	Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar	KELUARAN	Dokumen	12	12	23-03-2022	03-01-2023
2.13.5	Jasa Pengelola Administrasi Keuangan dan Barang / Jasa	KELUARAN	Orang	18	18	08-11-2022	03-01-2023
2.14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
2.14.1	Bahan Bakar Minyak	KELUARAN	Liter	23516	23516	23-03-2022	03-01-2023
2.14.2	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	KELUARAN	Unit	3	3	04-04-2022	03-01-2023
2.14.3	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	KELUARAN	Unit	3	3	04-04-2022	04-01-2023
2.14.4	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	KELUARAN	Unit	10	10	04-04-2022	09-06-2022
2.14.5	Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	KELUARAN	Unit	10	7	04-04-2022	03-10-2022
2.15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
2.15.1	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KELUARAN	Jenis	8	8	04-04-2022	03-01-2023
2.16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Tipe	Satuan	Target	Realisasi	Tgl Entri	Tgl Revisi
2.16.1	Gedung Kantor	KELUARAN	Unit	1	1	04-04-2022	04-04-2022
3	PROGRAM PENATAAN DESA						
3.1	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa						
3.1.1	Kalurahan yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Kewenangan Desa (Produk Hukum, Aset Kal, Batas Kal)	KELUARAN	Kalurahan	75	75	01-07-2022	01-07-2022
4	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA						
4.1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota						
4.1.1	Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas BKAD dan BPUPK meningkat 100% dari 34 Orang	KELUARAN	Orang	34	34	05-09-2022	05-09-2022
4.1.2	Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK Meningkat 100% dari 70 Orang	KELUARAN	Desa	70	70	06-12-2022	06-12-2022
4.1.3	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Kerjasama Antar Desa	KELUARAN	Desa	25	25	06-12-2022	06-12-2022
4.1.4	Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas UPK meningkat sebanyak 100% dari 51 Orang	KELUARAN	Orang	51	51	02-07-2022	02-07-2022
5	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						
5.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						
5.1.1	Kalurahan yang Terfasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Laporan Lurah dan SID)	KELUARAN	Kalurahan	75	75	07-09-2022	07-09-2022
5.2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa						
5.2.1	Pamong Desa yang Mendapatkan Bimtek Penyelenggaraan Musrenbang	KELUARAN	Orang	150	150	04-10-2022	03-01-2023
5.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa						
5.3.1	Kalurahan yang terfasilitasi pendampingan Dana Desa dan ADD	KELUARAN	Kalurahan	75	75	04-10-2022	04-10-2022
5.3.2	Pamong Kalurahan yang Mendapatkan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	KELUARAN	Orang	75	75	10-05-2022	10-05-2022
5.4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa						
5.4.1	Meningkatnya Pemahaman Peserta Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa	KELUARAN	Persen	80	80	08-09-2022	08-09-2022
5.4.2	Meningkatnya Pemahaman Peserta Bimtek Pengawasan	KELUARAN	Persen	80	80	08-09-2022	08-09-2022
5.5	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa						
5.5.1	Laporan Sosialisasi DD	KELUARAN	Dokumen	1	1	10-05-2022	10-05-2022
5.5.2	Meningkatnya Pemahaman Peserta Bimtek Pelaporan Pelaksanaan Dana Desa	KELUARAN	Persen	80	80	04-10-2022	04-10-2022
5.5.3	Laporan Pelaksanaan Dana Desa	KELUARAN	Dokumen	1	0	03-01-2023	03-01-2023
5.5.4	Cakupan Peningkatan Peran dan Tanggungjawab Pemerintah Desa	HASIL	Persen	80	80	04-10-2022	03-01-2023
5.6	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa						
5.6.1	Pemahaman Peserta Bimtek Pemberdayaan Usaha Ekonomi Pedesaan Meningkatkan 80% dari 75 Orang	KELUARAN	Orang	60	60	04-10-2022	04-10-2022
5.6.2	Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Bumdes Meningkatkan 80% dari 300 orang	KELUARAN	Orang	240	240	10-05-2022	03-01-2023
5.6.3	Pemahaman Peserta Pelatihan Budes Meningkatkan 80% dari 360 Orang	KELUARAN	Orang	288	288	04-10-2022	04-10-2022

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Tipe	Satuan	Target	Realisasi	Tgl Entri	Tgl Revisi
5.6.4	Pelatihan Pemberdayaan Bumdes	KELUARAN	Lokasi	10	6	10-06-2022	04-07-2022
5.6.5	Pemahaman Peserta Bimtek Program Global Gotong Royong Meningkatkan 80% dari 100 Orang	KELUARAN	Orang	80	80	02-07-2022	02-07-2022
5.6.6	Jasa Tenaga Administrasi	KELUARAN	Bulan	12	12	10-05-2022	03-01-2023
5.6.7	Sosialisasi Bumdes Wijirejo	KELUARAN	Orang	30	30	03-10-2022	03-10-2022
5.7	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa						
5.7.1	Peserta Koordinasi dan Bimtek Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah	KELUARAN	Orang	300	300	10-05-2022	06-12-2022
5.7.2	Cakupan Peningkatan Peran dan Tanggungjawab Pemerintah Desa	HASIL	Persen	80	80	04-10-2022	03-01-2023
5.8	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						
5.8.1	Peserta Koordinasi dan Bimtek Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	KELUARAN	Orang	300	300	10-05-2022	04-10-2022
5.8.2	Cakupan Peningkatan Peran dan Tanggungjawab Pemerintah Desa	HASIL	Persen	80	80	04-10-2022	03-01-2023
5.9	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa						
5.9.1	Laporan Evaluasi Profil Desa	KELUARAN	Dokumen	1	1	04-10-2022	04-10-2022
5.9.2	Meningkatnya Pemahaman Peserta Bimtek Profil Desa	KELUARAN	Persen	80	80	30-09-2022	30-09-2022
5.9.3	Meningkatnya Pemahaman Peserta Bimtek Lomba Desa/ Kalurahan	KELUARAN	Persen	80	80	30-09-2022	30-09-2022
5.9.4	Laporan Pelaksanaan Lomba Desa/ Kalurahan	KELUARAN	Dokumen	1	1	07-09-2022	07-09-2022
5.9.5	Laporan Pembinaan Lomba Desa/ Kalurahan	KELUARAN	Dokumen	1	1	07-09-2022	07-09-2022
5.9.6	Cakupan Peningkatan Peran dan Tanggungjawab Pemerintah Desa	HASIL	Persen	80	80	04-10-2022	03-01-2023
5.10	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD						
5.10.1	Anggota Bamuskal yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	KELUARAN	Orang	75	75	10-06-2022	10-06-2022
5.10.2	Cakupan Peningkatan Peran dan Tanggungjawab Pemerintah Desa	HASIL	Persen	80	80	04-10-2022	03-01-2023
5.11	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa						
5.11.1	Desa/ Kalurahan yang mendapatkan pendampingan bantuan keuangan kepada pemerintah Desa	KELUARAN	Desa/ Kalurahan yang	75	75	04-04-2022	04-10-2022
5.11.2	Cakupan Peningkatan Peran dan Tanggungjawab Pemerintah Desa	HASIL	Persen	80	80	04-10-2022	03-01-2023
5.12	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan						
5.12.1	Desa Mendapatkan Pendampingan Lomba Desa	KELUARAN	Kalurahan	75	75	10-05-2022	10-05-2022
5.12.2	Cakupan Peningkatan Peran dan Tanggungjawab Pemerintah Desa	HASIL	Persen	80	80	04-10-2022	03-01-2023
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						
6.1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						
6.1.1	PKK Kalurahan yang Mendapatkan Pendampingan P2W-KSS	KELUARAN	PKK Kalurahan	6	6	02-07-2022	03-01-2023

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Tipe	Satuan	Target	Realisasi	Tgl Entri	Tgl Revisi
6.1.2	Kalurahan yang Mendapatkan Pendampingan Pemberdayaan Posyandu dan PAUD	KELUARAN	Kalurahan	75	75	04-04-2022	04-04-2022
6.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						
6.2.1	Peserta yang Memahami Bimtek Pengelolaan Kegiatan PMT AS	KELUARAN	Persen	80	80	02-07-2022	02-07-2022
6.2.2	Peserta yang memahami Peningkatan Kapasitas Pokja dan Pokjanal Posyandu	KELUARAN	Persen	80	0	03-01-2023	03-01-2023
6.2.3	Seleksi TOBERMAS	KELUARAN	Dokumen	1	1	03-01-2023	03-01-2023
6.2.4	Penyelenggaraan Operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	KELUARAN	Dokumen	1	1	03-01-2023	03-01-2023
6.2.5	Peserta yang Memahami Bimtek Keterpaduan Posyandu Bagi Kader Posyandu	KELUARAN	Persen	80	80	10-05-2022	10-05-2022
6.2.6	Kalurahan yang Mengikuti Seleksi Tokoh Pemberdayaan Masyarakat	KELUARAN	Kalurahan	75	75	02-07-2022	02-07-2022
6.2.7	Lomba Posyandu	KELUARAN	Dokumen	1	1	10-05-2022	10-05-2022
6.2.8	Peserta yang Memahami Bimtek Pelaporan Konvergensi Stunting	KELUARAN	Persen	80	80	03-01-2023	03-01-2023
6.2.9	Peserta yang Memahami Bimtek Penguatan Kelembagaan TP PKK	KELUARAN	Persen	80	80	03-01-2023	03-01-2023
6.2.10	Peserta yang Memahami Peningkatan Kapasitas LPM	KELUARAN	Persen	80	80	10-05-2022	10-05-2022
6.2.11	Peserta yang Memahami Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu	KELUARAN	Persen	80	80	10-05-2022	10-05-2022
6.2.12	Pemberian PMT AS Bagi Anak TK/ RA	KELUARAN	Dokumen	1	1	04-10-2022	04-10-2022
6.2.13	Anggota LKK yang Mendapatkan Bimtek Penguatan Kelembagaan	KELUARAN	Orang	360	360	04-10-2022	04-10-2022
6.2.14	Peserta yang Memahami Pelatihan Pemasak PMT AS	KELUARAN	Persen	80	80	03-10-2022	03-10-2022
6.3	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						
6.3.1	Laporan Bimtek PAB	HASIL		0	0		
6.4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa						
6.4.1	Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pelaku Pasar Desa Meningkat 80% dari 70 Orang	KELUARAN	Orang	56	56	05-09-2022	05-09-2022
6.4.2	Laporan Pelaksanaan Carnaval	KELUARAN	Dokumen	1	1	03-01-2023	03-01-2023
6.4.3	Pemahaman Peserta Mobilitas Training Pedagang Pasar Desa Meningkat 80% dari 120 Orang	KELUARAN	Orang	80	80	05-09-2022	05-09-2022
6.4.4	Laporan Pelaksanaan Bantul Expo	KELUARAN	Dokumen	0	0	03-01-2023	03-01-2023
6.5	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						
6.5.1	Pemahaman Peserta Bimtek Pelatihan Keterampilan Hasil Pertanian dan Peternakan yang Berbasis TTG Meningkat 80% dari 200 Orang	KELUARAN	Orang	160	160	10-05-2022	10-05-2022
6.5.2	Ekspose Lomba Kreasi dan Inovasi Penemu TTG	KELUARAN	Orang	50	50	02-07-2022	02-07-2022
6.5.3	Lomba Tehnologi Tepat Guna	KELUARAN	Kecamatan	17	17	02-07-2022	02-07-2022
6.5.4	Pemahaman Peserta Bimtek Pengembangan TTG Tingkat Kabupaten Bantul Meningkat 80% dari 51 Orang	KELUARAN	Orang	41	41	05-09-2022	05-09-2022

No	Program/ Kegiatan/ Indikator	Tipe	Satuan	Target	Realisasi	Tgl Entri	Tgl Revisi
6.5.5	Pelatihan Keterampilan Hasil Pertanian dan Peternakan Berbasis TTG	KELUARAN	Orang	100	100	10-05-2022	10-05-2022
6.5.6	Pemahaman Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengelola Posyantek Meningkatkan 80% dari 51 Orang	KELUARAN	Orang	41	41	03-01-2023	03-01-2023
6.6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						
6.6.1	Tim Penggerak PKK yang Mendapatkan Pendampingan Penyelenggaraan Gerakan PKK	KELUARAN	TP PKK	93	93	10-06-2022	03-01-2023
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN						
7.1	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul						
7.1.1	Pengukuhan Lurah Sebagai Pemangku Keistimewaan	KELUARAN	Lurah	48	48	02-07-2022	02-07-2022
7.1.2	Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan	KELUARAN	Orang	150	150	02-07-2022	02-07-2022
7.1.3	Tambahan Penghasilan sebagai Pengganti Pelungguh Kalurahan Trimurti dan Jagalan	KELUARAN	Bulan	12	12	02-07-2022	03-01-2023
7.1.4	Dokumen Laporan Pelaksanaan Monitoring Urusan Keistimewaan di Kalurahan	KELUARAN	Dokumen	1	1	03-01-2023	03-01-2023